



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN



**PENERJEMAHAN TEKS BERITA SIDANG, NON SIDANG
DAN MAJALAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

DZAKI DIFA AL HADIID

2108411007

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

**PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS UNTUK
KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL JURUSAN
ADMINISTRASI NIAGA POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

2024



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

- a. Judul Naskah : Penerjemahan Teks Berita Sidang, Non Sidang Dan Majalah Di Mahkamah Konstitusi
- b. Penyusun
 - 1) Nama : Dzaki Difa Al Hadiid
 - 2) NIM : 2108411007
- c. Jurusan : Administrasi Niaga
- d. Program Studi : Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional
- e. Waktu : 1 April – 30 Juli 2024
Pelaksanaan
- f. Tempat : Mahkamah Konstitusi
Pelaksanaan Jl. Medan Merdeka Barat 6, Jakarta Pusat

Pembimbing PNJ,


Depok,
Pembimbing Magang,


Dr. Dra. Ina Sukaesih, M.M., M.Hum.
NIP. 196104121987032004


R.A. Indah Apriyanti
NIP. 198004262009012001

Mengesahkan,
Koordinator Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan
Profesional




Dr. Dra. Ina Sukaesih, M.M., M.Hum.
NIP. 196104121987032004



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Penulis menyampaikan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya, penulis berhasil menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dengan judul "Penerjemahan Teks Berita Sidang, Non Sidang Dan Majalah Di Mahkamah Konstitusi." Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak, baik selama masa perkuliahan maupun pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan diberikan oleh berbagai pihak, termasuk:

1. Ibu Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL, M.M., M. Hum., selaku kepala program studi BISPRO sekaligus dosen pembimbing, yang telah menyediakan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk membantu penulis dalam menyusun laporan ini.
2. Miss Widi, selaku pembimbing penerjemahan dan guru di Mahkamah Konstitusi, yang telah memberikan ilmu dan arahan yang sangat berharga dalam proses penerjemahan.
3. Pak Noel, yang selalu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan menyenangkan, serta memberikan bimbingan dan arahan yang membuat penulis merasa diayomi, dirangkul, dan dituntun untuk menjadi seorang pekerja yang baik dalam melaksanakan tugas.
4. Orang tua dan keluarga penulis, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan bantuan baik secara moral maupun material di setiap kegiatan yang penulis tempuh selama Praktik Kerja Lapangan ini.

Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan, serta dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di masa mendatang. Penulis juga menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, 24 Juli 2024

Penulis,

Dzaki Difa Al Hadiid



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR TABEL.....	7
BAB I.....	8
PENDAHULUAN	8
1.1 LATAR BELAKANG KEGIATAN	8
1.2 RUANG LINGKUP KEGIATAN	9
1.3 WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN	10
1.4 TUJUAN DAN MANFAAT.....	10
1.4.1 TUJUAN	10
1.4.2 MANFAAT.....	11
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 DEFINISI PENERJEMAHAN	12
2.2 PROSES PENERJEMAHAN.....	12
2.3 IDEOLOGI PENERJEMAHAN	14
2.4 METODE PENERJEMAHAN.....	15
2.5 TEKNIK PENERJEMAHAN.....	16
2.6 TEKS JURNALISTIK	17
2.6.1 Berita Sidang.....	17
2.6.2 Berita Non Sidang.....	18
2.6.3 Majalah	18
2.6.2.1 Majalah Konstitusi:	18
BAB III	19
HASIL PELAKSANAAN	19
3.1 UNIT KERJA PRAKTIK.....	19
3.2 URAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	21
3.3 URAIAN PROSES MENERJEMAHKAN	24
3.3.1 Tahap Penerjemahan.....	24



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.3.1.1 Tahap Analisis.....	24
3.3.1.2 Tahap Pengalihan (Tranfer)	24
3.3.1.3 Tahap Rekonstruksi.....	28
3.4 IDENTIFIKASI KENDALA YANG DIHADAPI.....	28
3.5 CARA MENGATASI KENDALA	29
BAB IV	30
PENUTUP.....	30
4.1 KESIMPULAN	30
4.2 SARAN	30
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN.....	33





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Penerjemahan.....	13
Gambar 2. Struktur Organisasi Kerja Sama Luar Negeri MKRI.....	19
Gambar 3. Alur Penerjemahan.....	20





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Contoh Penggunaan Teknik Penerjemahan Harfiah	25
Tabel 2. Contoh Penggunaan Teknik Penerjemahan Amplifikasi	26
Tabel 3. Contoh Penggunaan Teknik Penerjemahan Padanan Lazim.....	27
Tabel 4. Contoh Penggunaan Teknik Penerjemahan Deskripsi	27





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kegiatan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu syarat penting yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi Sarjana Terapan di Politeknik Negeri Jakarta untuk mendapatkan gelar sarjana. Program PKL ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu dan keterampilan yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya. Selain itu, PKL juga bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa kepada dunia kerja, memberikan pengalaman praktis, serta memperluas wawasan mereka mengenai dinamika dan tantangan di bidang yang digeluti.

Dalam rangka memenuhi persyaratan PKL tersebut, penulis memilih untuk melaksanakan praktik kerja di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang memiliki fungsi menjaga konstitusi dan menegakkan keadilan konstitusional, sering kali berinteraksi dengan berbagai lembaga dan institusi di luar negeri. Salah satu forum utama yang mempertemukan MK dengan lembaga konstitusional lainnya di Asia adalah melalui *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* (AACC).

Salah satu bentuk kontribusi nyata dalam mendukung kerja sama internasional Mahkamah Konstitusi, termasuk melalui AACC, adalah melalui penerjemahan teks berita. Tugas utama selama menjalani PKL di Mahkamah Konstitusi adalah menerjemahkan berbagai teks berita terkait sidang maupun non-sidang dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Berita-berita yang diterjemahkan ini kemudian dipublikasikan di situs web resmi Mahkamah Konstitusi dalam versi bahasa Inggris (en.mkri.id).

Penerjemahan teks berita ini tidak hanya memerlukan kemampuan bahasa yang baik, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai terminologi hukum dan konteks yang relevan. Proses penerjemahan yang akurat dan tepat waktu sangat penting



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tetap sesuai dengan maksud dan tujuan aslinya. Dengan demikian, kualitas penerjemahan yang baik dapat mendukung citra dan reputasi Mahkamah Konstitusi di mata dunia internasional.

Oleh karena itu, laporan PKL yang berjudul "Penerjemahan Teks Berita Sidang, Non Sidang Dan Majalah Di Mahkamah Konstitusi" ini disusun untuk mendokumentasikan kegiatan, pengalaman, serta pembelajaran yang diperoleh selama menjalani praktik kerja di Mahkamah Konstitusi. Laporan ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya penerjemahan teks berita dalam mendukung komunikasi dan kerja sama internasional, serta kontribusi nyata yang dapat diberikan oleh seorang penerjemah dalam konteks lembaga peradilan tinggi seperti Mahkamah Konstitusi, termasuk dalam forum internasional seperti AACC.

1.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) meliputi berbagai tugas penerjemahan teks dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris yang berkaitan dengan berbagai kegiatan dan informasi yang dihasilkan oleh MKRI. Kegiatan penerjemahan ini bertujuan untuk mendukung transparansi dan aksesibilitas informasi kepada publik internasional. Adapun jenis-jenis teks yang diterjemahkan meliputi:

a. Majalah Konstitusi

Tugas penerjemahan meliputi artikel, laporan, wawancara, dan berbagai konten lain yang terdapat dalam Majalah Konstitusi yang diterbitkan oleh MKRI. Penerjemahan ini mencakup pemahaman mendalam terhadap terminologi hukum dan konteks spesifik yang disajikan dalam setiap edisi majalah, sehingga informasi yang disampaikan tetap akurat dan sesuai dengan maksud aslinya.

b. Berita Sidang

Kegiatan penerjemahan mencakup berita yang berkaitan dengan berbagai sidang yang diselenggarakan oleh MKRI. Ini termasuk sidang pengujian



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

undang-undang, sidang perselisihan hasil pemilihan umum, dan sidang-sidang lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi MKRI. Penerjemahan berita sidang ini memerlukan ketelitian dan pemahaman yang baik tentang proses dan terminologi hukum yang digunakan dalam setiap sidang.

c. Berita Non-Sidang

Tugas penerjemahan juga mencakup berita yang berkaitan dengan kegiatan MKRI yang tidak berhubungan langsung dengan sidang. Ini dapat berupa kegiatan seminar, workshop, kerja sama internasional, dan berbagai kegiatan lain yang diadakan oleh MKRI. Penerjemahan berita non-sidang ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang berbagai aktivitas MKRI kepada publik internasional.

Teks yang telah diterjemahkan akan dipublikasikan di website resmi MKRI versi bahasa Inggris (en.mkri.id). Publikasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat internasional, sehingga mereka dapat memahami berbagai kegiatan dan keputusan yang diambil oleh MKRI. Dengan demikian, kegiatan penerjemahan ini berperan penting dalam memperkuat citra dan reputasi MKRI di kancah internasional serta mendukung kerja sama global dalam bidang hukum dan konstitusi.

1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan selama tiga bulan, dimulai dari tanggal 1 April hingga 30 Juni. Tempat pelaksanaan magang adalah di kantor Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Penulis akan bekerja secara langsung di bawah bimbingan tim penerjemah MKRI.

1.4 Tujuan Dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

- a. Memperoleh pengalaman kerja praktis dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan di tempat pelaksanaan PKL.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- b. Menerapkan pengetahuan dan teori yang telah dipelajari selama pendidikan di Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional.
- c. Memperluas wawasan mengenai realitas dunia kerja yang sesungguhnya.

1.4.2 Manfaat

Manfaat yang dari pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini adalah:

1. Bagi Penulis
 - a. Pengembangan Keterampilan
Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan penerjemahan dan pemahaman bahasa hukum.
 - b. Pengalaman Praktis
Mahasiswa memperoleh pengalaman kerja yang relevan dengan bidang studi mereka, meningkatkan daya saing di dunia kerja.
 - c. Jaringan Profesional
Mahasiswa memiliki kesempatan untuk membangun jaringan profesional dengan staf dan pejabat di Mahkamah Konstitusi
2. Bagi Mahkamah Konstitusi
 - a. Dukungan Operasional
Mahkamah Konstitusi mendapatkan bantuan dalam mengelola volume besar berita terkait pilkada dan pilpres yang harus diterjemahkan ke bahasa Inggris, sehingga tidak terbebani oleh banyaknya tugas penerjemahan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Selama periode magang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, telah tercapai pemahaman mendalam mengenai dinamika dan tantangan dalam penerjemahan teks hukum dan berita. Pengalaman ini telah memberikan wawasan yang luas tidak hanya dalam aspek linguistik tapi juga dalam pengenalan praktik hukum dan prosedural di tingkat konstitusi. Kemampuan untuk menerjemahkan dokumen hukum dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan akurat telah berkembang signifikan, berkat bimbingan dari mentor dan kerja sama dengan penerjemah tetap.

Selain itu, interaksi dengan berbagai divisi dalam MKRI telah mengajarkan pentingnya komunikasi dan kerjasama dalam sebuah organisasi besar. Keterampilan ini sangat vital dalam konteks profesional dan telah menjadi aset berharga yang diperoleh selama magang. Pengalaman langsung dalam menyaksikan sidang dan mempersiapkan materi terjemahan untuk publikasi juga telah meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan praktis dalam bidang hukum dan penerjemahan.

4.2 Saran

Berdasarkan pengalaman selama magang, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan program magang di masa depan dan operasional di MKRI. Pertama, disarankan agar sesi orientasi untuk magang baru diperkaya dengan materi pra-pelatihan yang lebih komprehensif mengenai terminologi hukum dan prosedur kerja di MKRI. Ini akan membantu magang baru beradaptasi lebih cepat dan efisien dengan lingkungan kerja.

Kedua, penting bagi MKRI untuk terus memperbarui dan memperluas basis data referensi yang digunakan untuk penerjemahan. Hal ini akan mempermudah pencarian padanan kata dan memastikan kesesuaian terjemahan dengan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

penggunaan bahasa yang berlaku saat ini. Penyediaan akses ke sumber-sumber hukum internasional juga akan membantu penerjemah dalam memahami konteks global dari isu-isu hukum yang dibahas.

Ketiga, penerapan teknologi penerjemahan terkini seperti perangkat lunak CAT dapat ditingkatkan untuk membantu penerjemah meningkatkan kecepatan dan akurasi terjemahan. Investasi dalam teknologi ini akan membuahkan hasil jangka panjang dalam efisiensi operasional MKRI.

Terakhir, pengembangan program mentorship yang lebih terstruktur dan berkelanjutan akan sangat membantu dalam pengembangan profesional para magang. Mentorship yang baik tidak hanya memberikan arahan teknis tetapi juga membangun kepercayaan diri dan keterampilan interpersonal magang, yang penting untuk pertumbuhan karir mereka di masa depan.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions. (2024). *About*. Retrieved July Thursday, 2024, from <https://aacc-asia.org/en/1/1/profile.aacc>
- Hoed, B. H. (2006). *Penerjemahan dan kebudayaan*. Bandung : Pustaka Jaya.
- Larson, & L., M. (1998). *Meaning-based Translation*. Portland: University Press of America.
- Mahkamah Konstitusi. (2024). *SEJARAH DAN PERKEMBANGAN*. Retrieved July Thursday, 2024, from <https://mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2>
- Molina, & Albir. (2002). *Translation Techniques Revisited: A Dynamic and Functionalist Approach*. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.
- Nababan, M. (2003). *Translation processes, practices, and products of professional Indonesian translators*. Wellington: Victoria University of Wellington.
- Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. Michigan: Universitas Michigan.
- Nida, E. A., & Taber, C. R. (1974). *The Theory and Practice of Translation*. Netherlands: The United Bible Societyu.
- Rasul, S. H. (2019). *Journalistic Translation*. Cambridge Scholars Publishing.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

L-1 Surat Penerimaan Magang



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1766/KP.02.00/03/2024
Lampiran : 1 dokumen
Perihal : Pemanggilan Peserta

Jakarta, 07 Maret 2024

Kepada Yth.

1. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan PNJ
2. Director of Internship and Career Center President University
3. Head of BBA Program IPMI International Business School

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan magang penerjemah di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk mendukung penyelenggaraan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan hal berikut.

1. Pelaksanaan magang penerjemah pada tanggal 1 April s.d. 14 Juni 2024 bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat.
2. Waktu pelaksanaan magang dimulai pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB pada hari Senin s.d. Jumat;
3. Daftar Mahasiswa yang diterima untuk magang penerjemah sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
4. Peserta bertugas menerjemahkan berita sidang dan non-sidang selama PHPU berlangsung, dan tugas lainnya yang ditetapkan oleh supervisor;
5. Tata Tertib Pelaksanaan Magang Penerjemah dan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan magang, dapat disimak oleh peserta melalui *whatsapp group (WAG)*.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia
dan Organisasi
Sri Handayani



Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Sri Handayani - NIP:197106202006042001

Digital Signature
mk-79143327240307010001

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran I

Nomor : 1766/KP.02.00/03/2024

Tanggal : 07 Maret 2024

**Daftar Peserta Magang Penerjemah
Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**

No	Nama Mahasiswa	Asal Institusi
1.	Dzaki Difa Al Hadiid	Politeknik Negeri Jakarta
2.	Frity Michael Br Sembiring	Politeknik Negeri Jakarta
3.	Intan Selvira Fauzi	Politeknik Negeri Jakarta
4.	Muhammad Ariva Aswin Bahar	Politeknik Negeri Jakarta
5.	Naomi Andrea Zebua	Politeknik Negeri Jakarta
6.	Putri Ratnasari	Politeknik Negeri Jakarta
7.	Bintang Salsabilla Rosda	President University
8.	Farah Shabrina	President University
9.	Gabrielle Karinawati Woodside	President University
10.	Jessica Rivena	President University
11.	Safira Anisa Putri	President University
12.	Siti Nurhaliza	President University
13.	Sedanti Anjali Putri	IPMI International Business School





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

L-2 Surat Perpanjangan Magang (PNJ)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G. A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman: <http://www.pnj.ac.id>, Posel: humas@pnj.ac.id

Nomor : 2946/PL3/PK.01.09/2024

15 Mei 2024

H a l : Permohonan Perpanjangan Magang Industri

Yth.

Ibu Sri Handayani

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3, Gambir

Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Dengan hormat,

Merujuk pada surat kami nomor 1561/PL3/PK.01.09/2024 tanggal 27 Februari 2024 mengenai Pengiriman Mahasiswa Magang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, melalui surat ini kami sampaikan permohonan perpanjangan magang industri mahasiswa program studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional (Bispro) Jurusan Administrasi sampai 31 Juli 2024, atas nama:

No.	N a m a	N I M	No. HP	Email
1	Dzaki Difa Al Hadiid	2108411007	087772793564	dzaki.difa.al.hadiid.an21@mhs.sw.pnj.ac.id
2	Naomi Andrea Zebua	2108411019	089522087083	naomi.andrea.zebua.an21@mhs.sw.pnj.ac.id
3	Intana Selvira Fauzi	2108411024	08815434743	intana.selvira.fauzi.an21@mhs.sw.pnj.ac.id
4	Putri Ratnasari	2108411035	085782019602	putri.ratnasari.an21@mhs.sw.pnj.ac.id
5	Muhammad Ariva Aswin Bahar	2108411047	085710920177	muhammad.ariva.aswin.bahar.an21@mhs.sw.pnj.ac.id

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Ibu, kami ucapkan terima kasih.



an. Direktur

Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan

Iwa Sudradjat, S.T., M.T.

NIP 196106071986011002

Tembusan:

1. Direktur
2. Wakil Direktur Bidang Akademik
3. Ketua Jurusan Administrasi Niaga
4. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

L-3 Surat Perpanjangan Magang (MK)



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2924/KP.02.00/06/2024
Lampiran : -
Perihal : Informasi Penerimaan Magang

Jakarta, 13 Juni 2024

Yth. Direktur
Politeknik Negeri Jakarta
Di Tempat

Sehubungan dengan permohonan perpanjangan magang industri yang diajukan melalui Surat Nomor 2946/PL3/PK.01.09/2024, dapat kami sampaikan bahwa permohonan tersebut dapat diterima. Adapun ketentuan pelaksanaan kegiatan magang sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang dinyatakan diterima untuk magang adalah :

No	Nama	NIM	Keterangan
1	Dzaki Difa Al Hadiid	2108411007	Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional (Bispro)
2	Naomi Andrea Zebua	2108411019	
3	Intana Selvira Fauzi	2108411024	Jurusan Administrasi
4	Putri Ratnasari	2108411035	
5	Muhammad Ariva Aswin Bahar	2108411047	

2. Waktu pelaksanaan magang pada 19 s.d. 28 Juni 2024 dilaksanakan melalui *self learning* secara *hybrid* untuk penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan pada periode 1 April s.d. 14 Juni 2024. Sedangkan pada 1 s.d. 31 Juli 2024 dilaksanakan secara tatap muka bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat 10110.

Demikian penyampaian kami, informasi lebih lanjut dapat menghubungi (021) 23529000. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro SDM dan Organisasi
Sri Handayani



Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Sri Handayani - NIP.197106202006042001
Digital Signature
mk-1608705953240613092445

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177
Email: Office@mkri.id



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

L-4 Sertifikat





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
ADMINISTRASI NIAGA

Jalan Prof. Dr. G. A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7863534, 7864927, 7864926, 7270042, 7270035

Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting

Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

FORM PEMBIMBINGAN PKL

1. Nama : Mahkamah Konstitusi
Perusahaan/Industri
2. Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat 6 Jakarta 10110
3. Judul PKL : Penerjemahan Teks Berita Sidang, Non Sidang Dan Majalah Di Mahkamah Konstitusi
4. Nama Penyelia : Yuniar Widiastuti

Hari/Tanggal	Aktivitas Yang Dilakukan
Senin, 01 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Pengenalan Subbagian Sekertariat AACC Dan Kerja Sama Luar Negeri Ksln • Orientasi Awal Magang
Selasa, 02 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Latihan Menerjemahkan Berita Non-Sidang
Rabu, 03 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Profil Hakim Mk • Mencari Dan Menginput Berita Mengenai Hubungan Internasional Antara Mahkamah Konstitusi Dengan Negara Lain Ke Dalam Google Docs
Kamis, 04 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Bersama AACC
Jumat, 05 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menyaksikan Sidang Pemeriksaan Persihan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2024 • Buka Puasa Bersama MK
Selasa, 16 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Majalah Konstitusi
Rabu, 17 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Meeting Bersama Humas Mk • Menerjemahkan Majalah Konstitusi
Kamis, 18 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Majalah Konstitusi
Jumat, 19 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Majalah Konstitusi
Senin, 22 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menyaksikan Sidang Putusan PHPU 2024 • Membuat Berita Sidang PHPU 2024
Selasa, 23 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Meeting Dengan Subbagian Kerja Sama Luar Negeri
Rabu, 24 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Meeting Dengan Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri (KSDN) • Mengunjungi Pusat Konstitusi
Kamis, 25 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi Kelompok Mengena Penugasan Daftar Kerja Sama Multilateral Antara Mkri Dengan Lembaga Sejenis Di Luar Negeri

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Jumat, 26 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Mempresentasikan Hasil Diskusi Mengenai Daftar Kerja Sama Multilateral Antara Mkri Dengan Lembaga Sejenis Di Luar Negeri • Mengambil Video Untuk Konten MK
Senin, 29 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Meeting</i> Bersama Mentor Untuk Persiapan Menerjemahkan Sidang PHPU 2024
Selasa, 30 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Rabu, 01 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Kamis, 02 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Jumat, 03 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Senin, 06 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Selasa, 07 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Rabu, 08 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Kamis, 09 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Jumat, 10 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Senin, 13 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Selasa, 14 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Rabu, 15 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Kamis, 16 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • -
Jumat, 17 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • -
Senin, 20 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Selasa, 21 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Rabu, 22 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Kamis, 23 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Jumat, 24 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Senin, 27 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Selasa, 28 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Rabu, 29 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Kamis, 30 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Jumat, 31 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Selasa, 04 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Rabu, 05 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Kamis, 06 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Jumat, 07 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Senin, 10 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Selasa, 11 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Rabu, 12 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Tour MK
Kamis, 13 -30 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> • WFA Dan Mempersiapkan Laporan Magang
Senin, 01 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Briefing Penempatan Magang • Mengunjungi Pusat Konstitusi Mk
Selasa, 02 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Mengambil Foto Sidang • Mengajari Teman Cara Memakai Kamera Professional
Rabu, 03 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat Siaran Pers Untuk Perkara No,49/PUU-XXII2024



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	<ul style="list-style-type: none">• Merecap Konten Sosmed MK
Kamis, 04 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• Merecap Konten Sosmed Mk
Jumat, 05 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• Mengedit Majalah Konstitusi Edisi Juni 2024
Senin, 08 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• Membuat Siaran Pers Untuk Sidang Perkara• Menerjemahkan Berita Non Sidang
Selasa, 09 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• Membuat Siaran Pers
Rabu, 10 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• Merecap Dokumen Kerjasama MK Dengan Organisasi Dalam Negeri
Kamis, 11 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• Membuat Konten Tiktok MKRI
Jumat, 12 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• Melanjutkan Konten Tiktok MKRI
Senin, 15 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• Mendampingi Kunjungan Mahasiswa Dari Universitas Bojonegoro• Mendampingi Sidang Pemeriksaan Pendahuluan
Selasa, 16 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• Mendampingi Sidang Permohonan
Rabu, 17 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• -
Kamis, 18 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• Mengarsip MoU Antara MK Dan Universitas Di Indonesia
Jumat, 19 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• -
Senin, 22 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• Menerjemahkan Berita Puu• Menerjemahkan Majalah Konstitusi
Selasa, 23 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• Menerjemahkan Berita Puu• Menerjemahkan Majalah Konstitusi
Rabu, 24 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• Menerjemahkan Berita Puu• Menerjemahkan Majalah Konstitusi
Kamis, 25 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• Menerjemahkan Berita Puu• Menerjemahkan Majalah Konstitusi

Jakarta,..... 2024
Pembimbing/ Penyedia Magang

Yuniar Widiastuti



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

L-6 Form Bimbingan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
ADMINISTRASI NIAGA

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok
16425 Telepon (021) 7863534, 7864927, 7864926,
7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

FORM PEMBIMBINGAN PKL
(Pembimbing PNJ)

JUDUL PKL : Penerjemahan Teks Berita Sidang, Non Sidang Dan
Majalah Di Mahkamah Konstitusi

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	Rabu, 15 Mei 2024	Pembahasan BAB	
2	Rabu, 19 Juni 2024	Revisi BAB I dan II	
3	Jumat, 12 Juli 2024	Pemeriksaan BAB I dan II dan Pembahasan BAB III dan IV	
4	Rabu, 17 Juli 2024	Revisi BAB III dan IV	

Depok,2024
Pembimbing,

(Dra., Ina Sukaesih, Dipl. TESOL., M.M., M.Hum)
NIP 196104121987032004



L-7 Penerjemahaan Liputan Khusus Majalah Konstitusi

Liputan Khusus	SPECIAL COVERAGE
BERPACU MENUJU SENGGKETA HASIL PEMILU	Racing Towards Election Disputes
Pesta demokrasi dalam pemilihan umum (Pemilu) baru saja berlalu. Pemilu digelar secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 14 Februari 2024. Pemilu merupakan sarana perwujudan daulat rakyat (demokrasi). Tujuan pemilu yaitu untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 serta menjamin kesinambungan pembangunan nasional.	The democratic festival of the General Election (Pemilu) has just concluded. Election was held simultaneously across the entire territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia on February 14, 2024. Election is a means of realizing people's sovereignty (democracy). The purpose of Election is to form a democratic, strong government that gains public support to achieve national goals as mandated by the 1945 Constitution and to ensure the continuity of national development.
Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional (Constitutional-democratic state). Dalam sistem demokrasi konstitusional, daulat rakyat dan daulat hukum seiring sejalan saling menguatkan. Demokrasi tanpa hukum dapat menimbulkan anarkhi. Sedangkan hukum tanpa demokrasi menyebabkan diskriminasi. Intinya, demokrasi (daulat rakyat) dan nomokrasi (daulat hukum) tidak dapat dipisahkan.	Indonesia is a constitutional-democratic state. In a constitutional democracy, people's sovereignty and the rule of law reinforce each other. Democracy without law may lead to anarchy, while law without democracy causes discrimination. Essentially, democracy (people's sovereignty) and nomocracy (rule of law) cannot be separated.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>Sejak Republik Indonesia berdiri hingga saat ini, Pemilu Anggota DPR dan DPRD telah dilaksanakan 13 kali. Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955. Berikutnya pemilu dilaksanakan pada 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan terakhir Pemilu 2024.</p>	<p>Since the founding of the Republic of Indonesia, legislative elections have been held 13 times. The first elections were held in 1955, followed by elections in 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, and the most recent in 2024.</p>
<p>Sengketa Hasil Pemilu di MK 2004-2024</p>	<p>Election Result Disputes at the Constitutional Court 2004-2024</p>
<p>Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang melaksanakan rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilu 2024. Masyarakat dapat menyaksikan real count hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang dirilis KPU di laman https:// pemilu2024.kpu.go.id/.</p>	<p>Currently, the General Elections Commission (KPU) is conducting the recapitulation of the 2024 Election vote counts. The public may monitor the real-time results of the Presidential and Vice Presidential elections (Pilpres) released by the KPU on the https://pemilu2024.kpu.go.id/.</p>
<p>Tentu saja kita berharap tahapan rekapitulasi berlangsung aman, tertib, dan lancar. Para peserta pemilu dan para pendukungnya, dituntut bersabar menanti hasil akhir pemilu yang akan disampaikan secara resmi oleh KPU. Semua permasalahan yang terjadi dalam proses pemilu dapat ditangani dan diselesaikan di tingkat penyelenggara sehingga tidak harus beperkara di MK.</p>	<p>We naturally hope the recapitulation phase proceeds smoothly and orderly. Election participants and their supporters should remain patient for the final results, which the KPU will officially announce. Ideally, any issues that arise during the election process should be resolved by the organizers, avoiding the need for disputes at the Constitutional Court (MK).</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>Kendati demikian, sejak jauh hari MK bersiap diri, mengantisipasi mengalirnya perkara sengketa pasca KPU secara resmi mengumumkan hasil Pemilu 2024. Berbagai ikhtiar telah dilakukan MK di antaranya, menerbitkan regulasi berupa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) ihwal tata beracara dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, DPD serta perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden. MK juga membentuk Gugus Tugas Penanganan Perkara PHPU 2024 yang melibatkan seluruh pegawai. Bahkan MK juga telah mengadakan bimtek yang melibatkan partai politik peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu, dan organisasi advokat.</p>	<p>However, anticipating potential post-election disputes once the KPU officially announces the 2024 Election results, the Court has been preparing for this possibility. Various efforts have been made by the Court, including issuing regulations in the form of Constitutional Court Regulations (PMK) regarding procedures in PHPU cases for members of the House of Representative (DPR) and People Legislative Council (DPRD), (Regional Representative Council (DPD), as well as the President and Vice President. The Court also established the 2024 PHPU Case Handling Task Force involving all staff. Furthermore, the Court has conducted technical guidance sessions involving political parties, election organizers, and advocacy organizations.</p>
<p>Sejak MK berdiri pada 2023, MK telah menangani sengketa pemilu sebanyak empat kali, yakni sengketa Pemilu 2004, 2009, 2014, 2019. Secara statistik, 676 perkara sengketa pemilu telah diputus oleh MK. Pengalaman selama empat kali menangani sengketa pemilu tersebut menjadi bahan pembelajaran berharga bagi MK untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara sengketa Pemilu 2024.</p>	<p>Since its establishment in 2003, the Court has handled election disputes four times: in the 2004, 2009, 2014, and 2019 elections. Statistically, the Court has resolved 676 election dispute cases. The experience from handling these disputes has been invaluable for the Court to improve the quality of handling the 2024 election dispute cases.</p>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>Pemilu adalah urat nadi demokrasi. Suara rakyat dalam pemilu adalah jantung demokrasi. Demokrasi akan mati jika suara rakyat dalam pemilu tidak dilindungi.</p>	<p>Elections are the lifeblood of democracy. The people's voice in elections is the heart of democracy. Democracy will perish if the people's voice in elections is not protected.</p>
<p>Sengketa Hasil Pemilu 2004</p>	<p>2004 Election Dispute</p>
<p>Pemilu 2004 menjadi pembuka sejarah pemilu langsung di Indonesia. Untuk pertama kalinya rakyat memilih langsung anggota DPR, DPD, DPRD (Provinsi, Kabupaten/Kota), serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Legislatif Tahun 2004 diikuti oleh 24 Parpol. Pemilu DPD diikuti oleh 128 perseorangan calon anggota DPD. Sedangkan Pemilu Presiden diikuti oleh lima pasangan calon, yaitu pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid, pasangan Megawati Soekarnoputri-Ahmad Hasyim Muzadi, pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar.</p>	<p>The 2004 Election marked the beginning of direct elections in Indonesia. For the first time, citizens directly elected members of the DPR, DPD, DPRD (Provincial, District/City), and the President and Vice President. The 2004 Legislative Election was participated by 24 political parties. The DPD election had 128 independent candidates, while the Presidential Election featured five pairs of candidates: Wiranto-Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri-Ahmad Hasyim Muzadi, Amien Rais-Siswono Yudo Husodo, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, and Hamzah Haz-Agum Gumelar.</p>
<p>Hasil Pemilu 2004 menyisakan sengketa yang bermuara ke MK. Sebanyak 23 Parpol mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Legislatif 2004 ke MK. Kemudian 21 calon anggota DPD dari 13 provinsi, juga mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu 2004 ke MK. Mereka menganggap telah terjadi kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU, sehingga</p>	<p>The results of the 2004 Election led to disputes that ended up in the Court. A total of 23 political parties filed disputes over the Legislative Election results. Additionally, 21 DPD candidates from 13 provinces also filed disputes, alleging errors in vote counting by the KPU that affected their election as DPD members.</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>mempengaruhi terpilihnya mereka menjadi anggota DPD.</p>	
<p>Permohonan perselisihan hasil Pemilu juga dilayangkan oleh pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid. Pasangan ini menganggap KPU telah keliru dalam melakukan penghitungan suara yang mengakibatkan pasangan mereka kehilangan jumlah suara yang signifikan sehingga tidak dapat berlaga dalam Pemilu Presiden 2004 Putaran Kedua.</p>	<p>The Wiranto-Salahuddin Wahid pair also filed a dispute, claiming the General Election Commission (KPU) made significant counting errors, resulting in their exclusion from the second round of the 2004 Presidential Election.</p>
<p>Di tengah keterbatasan fasilitas ruangan, MK menyidangkan perkara sengketa Pemilu 2004. Saat itu, MK sempat menggunakan fasilitas ruang milik Radio Republik Indonesia (RRI) dan Mabes Polri untuk menyidangkan perkara sengketa Pemilu 2004.</p>	<p>Due to limited facilities, the Court held the 2004 election dispute hearings using facilities from Radio Republik Indonesia (RRI) and the National Police Headquarters.</p>
<p>Ilustrasi partai politik peserta Pemilu 1955</p>	<p>Illustration of political parties participating in the 1955 General Election</p>
<p>Sengketa Pemilu 2009</p>	<p>2009 General Election Dispute</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>Pemungutan suara Pemilu 2009 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD hampir secara serentak dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia pada 9 April 2009. Pemilu 2009 diikuti oleh 44 Parpol yang terdiri dari 38 partai nasional dan 6 Parpol lokal Aceh.</p>	<p>The 2009 General Election vote was held almost simultaneously across Indonesia on April 9, 2009, to elect members of the DPR, DPD, and DPRD. The 2009 election saw participation from 44 political parties, consisting of 38 national parties and six local Aceh parties.</p>
<p>Sedangkan Pemungutan suara Pemilu Presiden 2009 diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pilpres diikuti tiga pasangan calon, yaitu Pasangan Susilo Bambang YudhoyonoBoediono, pasangan Megawati SoekarnoputriPrabowo Subianto, dan pasangan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto.</p>	<p>The Presidential Election vote took place on July 8, 2009, with three pairs of candidates: Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, and Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto.</p>
<p>Hasil Pemilu 2009 juga tak lepas dari sengketa. Untuk kali yang kedua sejak Pemilu 2004, pada Pemilu 2009 MK menangani sengketa hasil Pemilu. Sebanyak 69 perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif 2009 diputus MK. MK juga memutus perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh pasangan Megawati SoekarnoputriPrabowo Subianto, dan pasangan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto.</p>	<p>The 2009 election results also led to disputes. For the second time since 2004, the Court handled election result disputes. The Court ruled on 69 disputes over the 2009 Legislative Election results and also on disputes over the Presidential Election results filed by the Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto and Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto pairs.</p>
<p>Proses pencoblosan dalam Pemilu Tahun 2024 pada Rabu (14/2) silam</p>	<p>Voting process in the 2024 general election on Wednesday (14/2)</p>
<p>Sengketa Hasil Pemilu 2014</p>	<p>2014 Election Dispute</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>Pemungutan suara Pemilu 2014 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD hampir serentak dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia pada 9 April 2014. Pemilu 2014 diikuti oleh 15 Parpol yang terdiri dari 12 partai nasional dan 3 Parpol local Aceh.</p>	<p>The 2014 General Election for DPR, DPD, and DPRD members was held almost simultaneously across Indonesia on April 9, 2014. The 2014 election featured 15 political parties: 12 national parties and three local Aceh parties.</p>
<p>Tiga bulan berselang, tepatnya pada 9 Juli 2014 dilaksanakan Pemilu Presiden. Pemilu Presiden kali ini hanya diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan pasangan Prabowo SubiantoHatta Rajasa. Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden mengalahkan pasangan Prabowo SubiantoHatta Rajasa.</p>	<p>Three months later, on July 9, 2014, the Presidential Election was held, with only two pairs of candidates: Joko Widodo-Jusuf Kalla and Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Joko Widodo-Jusuf Kalla won the election, defeating Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.</p>
<p>Merasa dirugikan dengan hasil Pemilu Presiden 2014, pasangan Prabowo SubiantoHatta Rajasa mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden ke MK. Setelah melalui proses pemeriksaan di persidangan, pada 21 Agustus 2014 akhirnya MK memutuskan menolak seluruh permohonan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.</p>	<p>Feeling aggrieved by the Presidential Election results, the Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pair filed a dispute with the Court. After a series of court examinations, the Court eventually rejected their claims entirely on August 21, 2014.</p>
<p>Sebelumnya, MK telah memutus permohonan perselisihan hasil Pemilu Legislatif yang diajukan oleh seluruh Parpol nasional dan yang diajukan oleh Parpol lokal Aceh, serta memutus permohonan yang diajukan oleh calon anggota DPD.</p>	<p>Previously, the Court had resolved disputes over the Legislative Election results filed by national and local Aceh parties, as well as disputes filed by DPD candidates.</p>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Sengketa Hasil Pemilu 2019	2019 Election Dispute
<p>Pemilu Serentak 2019 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Salah satu perbedaan mendasar adalah dari segi pelaksanaan. Pada Pemilu 2014, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan secara terpisah dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.</p>	<p>The 2019 General Election differed fundamentally from previous elections. In the 2014 election, the elections for DPR, DPD, and DPRD members were held separately from the Presidential Election.</p>
<p>Sedangkan pemungutan suara Pemilu 2019 secara serentak digelar hampir di seluruh wilayah Indonesia pada 17 April 2019. Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), serta Presiden dan Wakil Presiden.</p>	<p>In contrast, the 2019 General Election vote was held almost simultaneously across Indonesia on April 17, 2019, for electing members of the DPR, DPD, DPRD (Provincial and District/City), and the President and Vice President.</p>
<p>Pemilu 2019 diikuti 14 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh. Kemudian 807 peserta perorangan calon anggota DPD. Pada pemilu kali ini terdapat dua pasangan calon presiden, yakni Pasangan Joko Widodo- Ma'ruf Amin (JokowiMa'ruf) dan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.</p>	<p>The 2019 General Election featured 14 national political parties and four local Aceh parties, as well as 807 independent DPD candidates. There were two pairs of presidential candidates: Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) and Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>KPU menetapkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin memperoleh suara terbanyak. Pasangan Prabowo-Sandi merasa tidak puas dengan proses dan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dalam Pemilu Serentak 2019 yang ditetapkan oleh KPU. Tim kuasa hukum pasangan Prabowo-Sandi mendaftarkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ke MK. Walhasil amar putusan MK yang diucapkan pada Kamis, 27 Juni 2019 pukul 21.16 WIB menyatakan menolak permohonan Pasangan Prabowo-Sandi untuk seluruhnya.</p>	<p>The KPU declared the Joko Widodo-Ma'ruf Amin pair as the winners. However, the Prabowo-Sandi team, dissatisfied with the process and results of the Presidential Election, filed a dispute with the Court. The Court, in its ruling on June 27, 2019, at 21:16 WIB, rejected their claims entirely.</p>
<p>Menatap Sengketa Hasil Pemilu 2024</p>	<p>Anticipating the 2024 Election Dispute</p>
<p>Pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Senada dengan Pemilu 2019, Pemilu 2024 juga digelar serentak lima kotak.</p>	<p>The 2024 Election vote took place on February 14, 2024. Similar to the 2019 election, the 2024 Pemilu was conducted with five ballot boxes.</p>
<p>Warga negara yang telah memiliki hak pilih, mencoblos lima kertas suara yang kemudian dimasukkan ke dalam lima kotak suara. Kertas suara warna hijau untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota, warna biru untuk memilih DPRD Provinsi, warna kuning untuk memilih anggota DPR RI, warna merah untuk memilih anggota DPD RI, serta kertas suara warna abuabu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.</p>	<p>Eligible voters cast their votes for five different ballots, each placed in five separate boxes: green for DPRD District/City members, blue for DPRD Provincial members, yellow for DPR RI members, red for DPD RI members, and grey for the President and Vice President.</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>Pemilu 2024 diikuti 24 partai politik yang terdiri atas 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal Aceh. Sedangkan untuk pemilu presiden dan wakil presiden diikuti oleh tiga pasangan calon. Pasangan Nomor Urut 1 H. Anies Rasyid Baswedan-H.A. Muhaimin Iskandar, pasangan Nomor Urut 2 H. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan Nomor Urut 3 H. Ganjar PranowoH.M. Mahfud MD.</p>	<p>The 2024 Election saw participation from 24 political parties: 18 national parties and six local Aceh parties. The Presidential Election featured three pairs of candidates: H. Anies Rasyid Baswedan-H.A. Muhaimin Iskandar, H. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, and H. Ganjar Pranowo-H.M. Mahfud MD.</p>
<p>Apakah hasil suara Pemilu 2024 yang ditetapkan KPU menuai sengketa di MK? Tentu kita berharap, permasalahan bisa diselesaikan di tingkat penyelenggara. Namun demikian, MK telah bersiap diri menangani sengketa.</p>	<p>Will the KPU's results for the 2024 Election lead to disputes at the Court? We hope any issues can be resolved by the organizers. Nonetheless, the Court is prepared to handle potential disputes.</p>





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

L-8 Penerjemahan Opini Konstitusi

KEMATIAN (LAGI) PARTAI POLITIK	The Recurrent Demise of Political Parties in Indonesia
Eksistensi partai politik di Indonesia timbul tenggelam seturut peralihan dan perebutan kekuasaan negara. Pada era prakemerdekaan Indonesia, organisasi menjadi alat terpenting untuk menghimpun semangat kebangsaan yang berupaya memerdekakan Indonesia. Partai politik adalah salah satu wujud organisasi demikian, yang dibentuk dengan mendasarkan kesamaan tujuan serta kesamaan cara untuk mencapai tujuan.	The existence of political parties in Indonesia has ebbed and flowed with the shifts and struggles for state power. During the pre-independence era, organizations were crucial in rallying nationalistic fervor to liberate Indonesia. Political parties were one such form of organization, created based on shared goals and methods to achieve them.
Setelah Indonesia merdeka, keberadaan partai politik mencapai masa kejayaannya. Semua orang atau kelompok dibebaskan membentuk partai politik, tanpa ada pembatasan ideologi anutan. Sayangnya banyak dan beragamnya partai politik yang ada belum diikuti dengan Pemilu yang ajeg. Dalam kurun waktu dua puluh lima tahun sejak awal kemerdekaan, Pemilu baru dapat terselenggara satu kali, yaitu di tahun 1955. Pemilu 1955 bertujuan mengisi kursi DPR dan Konstituante, dengan diikuti lebih dari 30 partai politik dan lebih dari seratus peserta perorangan.	After Indonesia gained independence, political parties experienced a golden era. Individuals and groups were free to establish political parties without ideological restrictions. Unfortunately, the sheer number and diversity of political parties were not matched by consistent elections. In the twenty-five years following independence, the first general election was held only once, in 1955. The 1955 election aimed to fill seats in the DPR (House of Representatives) and the Constituent Assembly, involving more than 30 political parties and over a hundred individual candidates.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>Setelah Pemilu 1955 hingga berakhirnya Pemerintahan Soekarno di akhir tahun 60-an, keberadaan partai politik mulai surut. Pertentangan antarpartai politik mengakibatkan Pemerintah ikut campur dengan membekukan beberapa partai yang tidak sejalan dengan Pemerintah.</p>	<p>From the 1955 election until the end of Sukarno's administration in the late 1960s, political parties began to wane. Conflicts among political parties led the government to intervene, freezing several parties that did not align with its policies.</p>
<p>Pasca pemerintahan Presiden Soekarno berakhir pada 1967, Soeharto yang diangkat menjadi Presiden Mandataris MPR/S berupaya menyelenggarakan kembali Pemilu. Pemilu pada era Orde Baru pertama kali dilakukan pada 1971 dengan diikuti “hanya” 10 partai politik, atau sepertiga jumlah partai politik peserta Pemilu 1955.</p>	<p>After Sukarno's presidency ended in 1967, Suharto, who was appointed as the People's Consultative Assembly Mandataris (Suharto era), attempted to reintroduce elections. The first election during the New Order era was held in 1971, with participation limited to only ten political parties—one-third of the number in the 1955 election.</p>
<p>Enam tahun setelahnya, pada Pemilu 1977, peserta pemilu tinggal dua partai politik dan satu golongan karya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta satu Golongan Karya. Berkurangnya jumlah peserta pemilu menjadi tiga ini tidak lain akibat “cawe-cawe” Presiden Soeharto dengan kebijakan fusi ‘penggabungan’ partai politik.</p>	<p>Six years later, in the 1977 General Election, only two political parties and one functional group participated: the Indonesian Democratic Party (PDI), the United Development Party (PPP), and Party of Functional Groups. This reduction to three participants was due to President Suharto's intervention with his fusion policy of merging political parties.</p>
<p>Sejak itu hingga kejatuhan Presiden Soeharto akibat Reformasi 1998, jumlah peserta pemilu dan jumlah partai politik tetap sama. Tidak ada pengurangan, akan tetapi tidak pula ada penambahan.</p>	<p>From then until President Suharto's fall due to the 1998 Reform, the number of electoral participants and political parties remained unchanged. There was neither a reduction nor an increase.</p>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>Pasca Reformasi 1998, pada era Pemerintahan B.J. Habibie kebijakan fusi partai politik dicabut. Pemilu 1999, yang dilaksanakan setahun setelah Soeharto turun, diikuti oleh 48 partai politik dan menandai kembalinya eksistensi partai politik di Indonesia.</p>	<p>After the 1998 Reform, under President B.J. Habibie's administration, the fusion policy was revoked. The 1999 General Election, held a year after Suharto stepped down, saw the participation of 48 political parties, marking the resurgence of political parties in Indonesia.</p>
<p>Kebangkitan Partai Politik</p>	<p>Revival of Political Parties</p>
<p>Melalui amandemen UUD 1945 bahkan partai politik diletakkan menjadi tulang punggung sistem kepemiluan. Partai politik ditempatkan sebagai (nyaris) satu-satunya entitas politik yang berwenang mewakili kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum.</p>	<p>Through the amendments to the 1945 Constitution, political parties have been established as the backbone of the electoral system. Political parties are placed as the (almost) sole political entities authorized to represent the people's will through the electoral mechanism.</p>
<p>Proses pengajuan kontestan pemilu didominasi oleh partai politik, kecuali pengajuan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan pengajuan sebagian calon kepala daerah. Dengan kata lain, partai politik diberi kewenangan untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR), calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta pasangan calon kepala daerah. Hanya calon anggota DPD dan pasangan kepala daerah independen yang pengajuannya tidak melalui partai politik.</p>	<p>The nomination process for election contestants is dominated by political parties, except for the nomination of Regional Representative Council (DPD) members and some regional head candidates. In other words, political parties are authorized to nominate presidential and vice-presidential candidates, candidates for the Regional People's Representative Council (DPR), candidates for the Regional House of Representatives (DPRD), and pairs of regional head candidates. Only DPD members and independent regional head candidates are not nominated through political parties.</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>Sayangnya kebangkitan peran partai politik tersebut tidak bertahan lama. Pemilu kali ini, terutama Pilpres 2024, menunjukkan kecenderungan bahwa dominasi bahkan keberadaan partai politik mulai sirna. Tentu bukan sirna dalam arti eksistensinya (keberadaan secara fisik) hilang, melainkan sirna dalam hal esensi atau peran kelembagaan.</p>	<p>Unfortunately, the resurgence of political parties' roles did not last long. This election, especially the 2024 Presidential Election, shows a tendency for the dominance and even the existence of political parties to begin to fade. Not in the sense of their physical existence, but in terms of their institutional essence or role.</p>
<p>Hal yang lebih ironis, sirnanya keberadaan partai politik demikian sama sekali bukan karena adanya perubahan hukum atau faktor eksternal, namun karena perubahan perilaku sekaligus penurunan rasa percaya diri partai politik itu sendiri. Partai politik mulai kehilangan kepercayaan diri untuk secara mandiri menentukan visi dan misi, program kerja, bahkan siapa yang akan mereka usung dan calonkan. Partai politik melarikan diri dari kebebasan terbesar mereka, yaitu kebebasan memutuskan tujuannya sendiri.</p>	<p>Ironically, this fading presence of political parties is not due to legal changes or external factors, but rather due to changes in behavior and a decline in the confidence of the political parties themselves. Political parties have begun to lose confidence in independently determining their vision and mission, work programs, and even who they will support and nominate. Political parties are fleeing from their greatest freedom, the freedom to decide their own objectives.</p>
<p>Hakikat Partai Politik</p>	<p>Essence of Political Parties</p>
<p>Istilah “partai politik” merupakan gabungan kata partai dan politik. “Partai” berasal dari kata pars (bahasa Latin) atau part (bahasa Inggris), yang artinya adalah ‘bagian’. Sementara istilah “politik” berasal dari kata polis (bahasa Latin) yang berarti ‘kota’. Sederhananya istilah partai politik merujuk pada sekelompok masyarakat berkepentingan sama yang merupakan bagian dari, atau mengambil bagian dalam, pemerintahan kota/negara.</p>	<p>The term "political party" is a combination of the words "party" and "political." "Party" comes from the Latin word "pars" or the English word "part," meaning 'a portion.' Meanwhile, "political" derives from the Latin word "polis," meaning 'city.' Simply put, a political party refers to a group of people with the same interests who are part of or take part in the governance of a city or state.</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>Penekanan konsep partai politik adalah pada daulat rakyat. Lebih spesifik pada daulat anggota partai politik atau konstituen. Hal inilah yang menjadi alasan utama kelahiran partai politik, yaitu sarana artikulasi kepentingan atau kehendak rakyat. Esensi partai politik adalah pada kehendak bebas atau kemerdekaannya yang mewakili kepentingan rakyat.</p>	<p>The core concept of a political party is rooted in popular sovereignty, more specifically in the sovereignty of party members or constituents. This is the primary reason for the existence of political parties, which serve as a means to articulate the interests or will of the people. The essence of a political party lies in its freedom or independence to represent the people's interests.</p>
<p>Secara alamiah terbentuknya partai politik tidak melulu berasal dari kehendak/kepentingan kolektif rakyat, melainkan dapat terbentuk pula berdasar prakarsa atau kesengajaan seseorang tertentu. Dengan kata lain terdapat dua tipe partai politik, yaitu partai berbasis kepentingan kader/ konstituen dan partai berbasis kepentingan pendiri partai. Kategorisasi demikian tentu tidak mutlak, melainkan tergantung sepenuhnya pada perspektif atau sudut pandang pengamat.</p>	<p>Naturally, the formation of a political party does not always stem from the collective will or interest of the people; it may also be formed based on the initiative or intention of certain individuals. In other words, there are two types of political parties: those based on the interests of members/constituents and those based on the interests of the party founders. Such categorization is not absolute and depends entirely on the observer's perspective.</p>
<p>Pemilu 2024: Matinya Partai Politik?</p>	<p>2024 Elections: The Death of Political Parties?</p>
<p>Kecenderungan sirna atau hilangnya esensi partai politik terlihat manakala kehendak partai-partai politik besar pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden ternyata dikendalikan oleh sosok atau figur yang justru bukan bagian dari partai politik bersangkutan. Praktik pengendalian demikian, yang dilakukan secara terang dan terbuka, merupakan tikaman keras bagi esensi partai politik di Indonesia.</p>	<p>The tendency of political parties losing their essence becomes apparent when the will of major political parties nominating presidential and vice-presidential candidates is actually controlled by figures outside those parties. This practice, done openly, is a severe blow to the essence of political parties in Indonesia.</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>Partai politik sebagai entitas -kumpulan orang pintar- yang seharusnya rasional, justru secara sukarela menyerahkan kendali atas diri mereka kepada pihak yang sama sekali bukan bagian dari mereka. Konsep partai (pars atau part) sebagai salah satu bagian dari masyarakat-negara, yang mengandaikan adanya perbedaan kepentingan dengan pars lainnya, ternyata begitu mudah disatukan dan menyatu hanya berdasarkan kepentingan pragmatis, yaitu elektabilitas semu bahkan sekedar iming-iming coattail effect. Hal demikian tidak terlalu mengagetkan mengingat rata-rata partai politik tidak mempunyai ketegasan ideologi dan tidak pula mengenal tradisi oposisi.</p>	<p>Political parties, as entities comprising intelligent individuals who are expected to be rational, are voluntarily relinquishing control to those who are not part of them. The concept of a party (pars or part), which suggests different interests among parts of society, is easily unified based on pragmatic interests like superficial electability or the lure of the coattail effect. This is not surprising, considering most political parties lack firm ideology and do not embrace opposition traditions.</p>
<p>Boleh saja partai politik berkilah bahwa “penyerahan kendali diri” seharusnya dimaknai sebagai mekanisme penyerapan aspirasi rakyat, yang kebetulan disampaikan melalui pihak non partai politik. Atau dari sisi rakyat, penyerahan kendali demikian dapat dimaknai sebagai pergerakan rakyat (melalui figur tertentu) untuk mengambil kembali kedaulatan yang selama ini dititipkan kepada partai politik. Alasannya bisa jadi karena partai politik tidak benar-benar mendengarkan dan mewujudkan aspirasi rakyat.</p>	<p>Political parties might argue that this "relinquishing control" should be seen as a mechanism for absorbing the people's aspirations, coincidentally conveyed through non-political party figures. From the people's perspective, this could be viewed as a movement to reclaim sovereignty from political parties that fail to listen to and realize their aspirations.</p>
<p>Kemungkinan mana pun yang terjadi, kendali pihak non partai politik kepada partai politik adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri. Di sinilah kemudian esensi partai politik sebagai pemain utama dalam pemilu, terutama dalam pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden, mulai goyah. Partai politik tak lebih menjadi cangkang atau selubung bagi kepentingan pihak non-partai politik. Eksistensi partai politik masih langgeng, namun sejatinya yang esensi telah hilang terhapus.</p>	<p>Whatever the reason, the fact remains that non-political figures control political parties. Here lies the crux where the essence of political parties as key players in elections, particularly in nominating presidential and vice-presidential candidates, starts to waver. Political parties become mere shells or veils for non-political interests. The existence of political parties remains, but their essence has vanished.</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>Lantas muncul pertanyaan apakah partai politik masih diperlukan? Mungkin sudah saatnya mempertimbangkan kembali untuk sekalian saja mengizinkan pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden secara independen alias tidak melalui jalur partai politik. Apalagi pada tahun 2007 pencalonan kepala daerah dari jalur independen sudah memperoleh payung hukum dan telah diimplementasikan hingga hari ini.</p>	<p>This raises the question: are political parties still necessary? It might be time to consider allowing independent presidential and vice-presidential candidates without party affiliation. In 2007, independent regional head candidates were legally recognized and have been implemented since.</p>
<p>Dalam konteks demikian, Pemilu 2024 terutama Pilpres, bukan hanya wahana bagi rakyat untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden lima tahun ke depan, melainkan wahana bagi partai politik untuk menentukan masa depan kemandirian mereka sendiri. Pilihan sikap partai politik hari ini akan membawa dua kemungkinan, yaitu meneguhkan peran dan posisinya di Indonesia, atau justru menghadirkan sekali lagi kematian esensi partai politik.</p>	<p>In this context, the 2024 elections, especially the presidential election, are not just a platform for the people to choose their leaders for the next five years but also an arena for political parties to decide their future independence. The choices political parties make today will either reaffirm their role and position in Indonesia or lead to the demise of their essence once again.</p>

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

L-9 Berita PHPU

Berita Bahasa Indonesia	Berita Bahasa Inggris
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20248	https://en.mkri.id/news/details/2024-04-29/PPP Claims Votes in W. Sumatra 1 Went to Garuda
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20257	https://en.mkri.id/news/details/2024-04-29/KPU Allegedly Used Special Voters List Illegally at 15 Muara Jaya TPS
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20266	https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20266&lang=eng
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20269	https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20266&lang=eng
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20298	https://en.mkri.id/news/details/2024-04-30/PPP Alleges Vote Purge in Four West Java Electoral Districts
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20306	https://en.mkri.id/news/details/2024-04-30/Gerindra Asks Revote in 53 Subdistricts in Majalengka, Subang
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20313	https://en.mkri.id/news/details/2024-04-30/PAN Wishes Cirebon 2 Tally Canceled, Says KPU Purged Votes
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20320	https://en.mkri.id/news/details/2024-04-30/PAN Wishes Cirebon 2 Tally Canceled, Says KPU Purged Votes
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20328	https://en.mkri.id/news/details/2024-04-30/Gerindra Candidates Fight for Votes for Bekasi DPRD
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20367	https://en.mkri.id/news/details/2024-05-02/PPP Disputes Vote Transfer to Garuda in North Sumatra DPR Election
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20377	https://en.mkri.id/news/details/2024-04-30/Three-Vote Margin, Gerindra Candidate Challenges Bekasi City 1 DPRD Results
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20385	https://en.mkri.id/news/details/2024-05-13/KPU Rejects PDI-P's Request for Revote in Bombana Regency 3
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20390	https://en.mkri.id/news/details/2024-05-02/Democrat Candidates Fight over Vote Inflation in Serdang Bedagai 4
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20401	https://en.mkri.id/news/details/2024-05-02/North Sumatra DPD Candidate Accuses KPU of Vote Inflation
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20410	https://en.mkri.id/news/details/2024-05-02/Democratic Party Claims Vote Inflation for PAN in South Kalimantan I



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20421	https://en.mkri.id/news/details/2024-05-02/Suspecting_Vote_Buying_Gerindra_Fights_for_DPRD_Second_Seat_in_Batam_City_2
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20569	https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20569&lang=eng





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

INTERNSHIP REPORT



TRANSLATION OF COURT HEARING NEWS, NON- HEARING NEWS AND MAGAZINE AT THE CONSTITUTIONAL COURT OF INDONESIA

DZAKI DIFA AL HADIID
2108411007

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

STUDY PROGRAM OF ENGLISH FOR BUSINESS AND
PROFESSIONAL COMMUNICATION DEPARTMENT OF
BUSINESS ADMINISTRATION
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2024



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

STATEMENT OF APPROVAL

- a. Title of Report : Translation Of Court Hearing News, Non-Hearing News, And Magazines At The Constitutional Court of Indonesia
- b. Author
 - 1) Name : Dzaki Difa Al Hadiid
 - 2) Student ID No : 2108411007
- c. Major : Business Administration
- d. Study Program : D-4 English for Business and Professional Communication
- e. Duration : 1 April – 30 July 2024
- f. Place of Internship : Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat 6, Jakarta Pusat

PNJ Internship Supervisor,

Dr. Dra. Ina Sukaesih, M.M., M.Hum.
NIP. 196104121987032004

Depok,
Internship Supervisor,

R.A. Indali Apriyanti
NIP. 198004262009012001

Approved by,
Coordinator of English for Business and Professional Communication Study
Programme



Dr. Dra. Ina Sukaesih, M.M., M.Hum.
NIP. 196104121987032004



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ACKNOWLEDGEMENT

The author expresses praise and gratitude to Allah SWT, for with His blessings and mercy, the author has successfully completed this Field Work Practice Report titled "Translation of Hearing News, Non-Hearing News, and Magazines at the Constitutional Court." The author realizes that the preparation of this report would not have been possible without the support of various parties, both during the study period and the implementation of the Field Work Practice. Therefore, the author wishes to express gratitude for the assistance provided by various parties, including:

1. Mrs. Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL, M.M., M. Hum., as the head of the BISPRO study program and the supervising lecturer, who has provided her energy, thoughts, and time to assist the author in compiling this report.
2. Miss Widi, as the translation supervisor and teacher at the Constitutional Court, who has imparted valuable knowledge and guidance during the translation process.
3. Mr. Noel, who always creates a positive and enjoyable work environment, and provides guidance and direction that made the author feel nurtured, embraced, and guided to become a good worker in carrying out tasks.
4. The author's parents and family, who always provide prayers, support, and assistance both morally and materially in every activity the author undertakes during this internship.

The author hopes that this report can be useful for readers and interested parties, and can serve as a reference for students who will carry out an Internship in the future. The author also realizes that this report is far from perfect, therefore constructive criticism and suggestions are highly expected for future improvements.

Jakarta, 24 July 2024

Writer,

Dzaki Difa Al Hadiid



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

TABLE OF CONTENTS

STATEMENT OF APPROVAL.....	2
ACKNOWLEDGEMENT	3
TABLE OF CONTENTS	4
LIST OF IMAGES	6
LIST OF TABLES	7
CHAPTER I.....	8
INTRODUCTION	8
1.1 BACKGROUND	8
1.2 SCOPE OF ACTIVITY.....	9
1.3 TIME AND PLACE OF ACTIVITY.....	10
1.4 OBJECTIVES AND BENEFITS	10
1.4.1 OBJECTIVES.....	10
1.4.2 BENEFITS.....	11
CHAPTER II.....	12
LITERATURE REVIEW.....	12
2.1 TRANSLATION DEFINITION.....	12
2.2 TRANSLATION PROCESS.....	12
2.3 TRANSLATION IDEOLOGY	14
2.4 METODE PENERJEMAHAN	14
2.5 TRANSLATION TECHNIQUE.....	16
2.6 TEKS JURNALISTIK	17
2.6.1 Court Hearing News	17
2.6.2 Non Hearing News.....	18
2.6.3 Magazine.....	18
2.6.2.1 Constitution Magazine:	18
CHAPTER III	19
RESULTS	19
3.1 INTERNSHIP WORKING UNIT.....	19
3.2 INTERNSHIP ACTIVITIES OVERVIEW	21
3.3 TRANSLATION PROCESS DESCRIPTION.....	23
3.3.1 Translation Stages.....	24
3.3.1.1 Analysis Stages	24
3.3.1.2 Transfer Stage	24



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.3.1.3 Restructuring Stage	28
3.4 IDENTIFICATION OF CHALLENGES	28
3.5 STRATEGIES TO OVERCOME CHALLENGES.....	29
CHAPTER IV	30
CONCLUSION.....	30
4.1 CONCLUSION	30
4.2 SARAN	30
BIBLIOGRAPHY	32
APPENDICES	33





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LIST OF IMAGES

Figure 1. Translation Process..... 13

Figure 2. MKRI Foreign Cooperation Organization Structure 19

Figure 3. Translation Workflow..... 20





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LIST OF TABLES

Table 1. Example of Literal Translation Technique	25
Table 2. Example of Amplification Translation Technique.....	26
Table 3. Example of Established Equivalent Translation Technique	26





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CHAPTER I INTRODUCTION

1.1 Background

Internship is one of the essential requirements that must be completed by students of the Applied Bachelor program at Politeknik Negeri Jakarta to obtain a bachelor's degree. This Internship program provides students with the opportunity to apply the knowledge and skills they have learned during their studies in a real work environment. Additionally, the Internship aims to introduce students to the working world, provide practical experience, and broaden their understanding of the dynamics and challenges in their chosen field.

To fulfil this Internship requirement, the author chose to undertake an internship at the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. The Constitutional Court (MK), as the highest judicial body in Indonesia responsible for safeguarding the constitution and upholding constitutional justice, often interacts with various institutions and organizations abroad. One of the main forums that connect the MK with other constitutional bodies in Asia is through the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC).

One tangible form of contribution in supporting the international cooperation of the Constitutional Court, including through the AACC, is through the translation of news texts. The primary task during the Internship at the Constitutional Court was to translate various news texts related to both court and non-court activities from Indonesian to English. These translated news pieces are then published on the official website of the Constitutional Court in English (en.mkri.id).

Translating these news texts requires not only good language skills but also a deep understanding of legal terminology and relevant context. Accurate and timely translation is crucial to ensure that the information conveyed remains



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

consistent with its original intent and purpose. Thus, high-quality translation can support the image and reputation of the Constitutional Court in the international arena.

Therefore, this Internship report, titled "Translation of Court News, Non-Court News, and Magazines at the Constitutional Court," is prepared to document the activities, experiences, and lessons learned during the internship at the Constitutional Court. This report is also expected to provide an overview of the importance of news text translation in supporting international communication and cooperation, as well as the tangible contributions that a translator can provide in the context of a high judicial institution like the Constitutional Court, including in international forums such as the AACC.

1.2 Scope of Activity

The scope of internship activities at the Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MKRI) includes various tasks of translating texts from Indonesian to English related to MKRI's activities and information. This translation work aims to support transparency and accessibility of information to the international public. The types of texts translated include:

a. Constitutional Magazine

The translation tasks include articles, reports, interviews, and various other contents from the Constitutional Magazine published by MKRI. This requires a deep understanding of legal terminology and the specific context presented in each edition to ensure the information remains accurate and true to its original intent.

b. Court Hearing News

The translation activities encompass news related to various court hearings held by MKRI. This includes judicial reviews, election dispute hearings, and other sessions related to MKRI's duties and functions.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Translating court news requires precision and a good grasp of the legal processes and terminology used in each hearings.

c. Non-Hearing News

The translation tasks also include news related to MKRI's activities that are not directly connected to court sessions. This can involve seminars, workshops, international collaborations, and other events organized by MKRI. Translating non-court news aims to provide a comprehensive overview of MKRI's various activities to the international public.

The translated texts are published on the official English version of the MKRI website (en.mkri.id). This publication aims to enhance transparency and accessibility of information to the international community, allowing them to understand MKRI's activities and decisions. Thus, these translation activities play a crucial role in strengthening MKRI's image and reputation on the international stage and supporting global cooperation in the fields of law and constitution.

1.3 Time and Place of Activity

This internship was conducted over three months, from April 1 to June 30. The internship took place at the office of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, located at Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Central Jakarta, DKI Jakarta. The author worked directly under the guidance of the MKRI translation team.

1.4 Objectives and Benefits

1.4.1 Objectives

- a. To gain practical work experience and actively participate in various activities at the internship location.
- b. To apply the knowledge and theories learned during the English for Business and Professional Communication study program.
- c. To broaden understanding of the realities of the professional world.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.4.2 Benefits

1. For the Writer
 - a. Skill Development
The opportunity to develop translation skills and understanding of legal language.
 - b. Practical Experience
Gaining relevant work experience in the field of study, enhancing competitiveness in the job market.
 - c. Professional Networking
The chance to build professional networks with staff and officials at the Constitutional Court.
2. For the Constitutional Court
 - a. Operational Support
Assistance in managing the large volume of election-related news that needs to be translated into English, reducing the translation workload.





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CHAPTER IV CONCLUSION

4.1 Conclusion

During the internship period at the Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MKRI), a profound understanding of the dynamics and challenges in translating legal texts and news was achieved. This experience provided broad insights not only into linguistic aspects but also into the legal and procedural practices at the constitutional level. The ability to accurately translate legal documents from Indonesian to English has significantly improved, thanks to the guidance from mentors and collaboration with permanent translators.

Additionally, interaction with various divisions within MKRI taught the importance of communication and cooperation in a large organization. These skills are vital in a professional context and have become valuable assets gained during the internship. Direct experience in witnessing court sessions and preparing translation materials for publication also boosted confidence and practical abilities in the fields of law and translation.

4.2 Recommendations

Based on the internship experience, several recommendations can be made to improve future internship programs and operations at MKRI. First, it is recommended that the orientation sessions for new interns be enriched with more comprehensive pre-training materials on legal terminology and work procedures at MKRI. This will help new interns adapt more quickly and efficiently to the work environment.

Second, it is important for MKRI to continually update and expand the reference database used for translation. This will facilitate the search for equivalent terms and ensure that translations align with current language usage.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Providing access to international legal sources will also assist translators in understanding the global context of the legal issues discussed.

Third, the application of the latest translation technology, such as CAT software, should be enhanced to help translators improve translation speed and accuracy. Investment in this technology will yield long-term benefits in MKRI's operational efficiency.

Finally, the development of a more structured and ongoing mentorship program will greatly aid in the professional development of interns. Effective mentorship not only provides technical guidance but also builds the confidence and interpersonal skills of interns, which are crucial for their future career growth.





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BIBLIOGRAPHY

- Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions. (2024). *About*. Retrieved July Thrusday, 2024, from <https://aacc-asia.org/en/1/1/profile.aacc>
- Hoed, B. H. (2006). *Penerjemahan dan kebudayaan*. Bandung : Pustaka Jaya.
- Larson, & L., M. (1998). *Meaning-based Translation*. Portland: University Press of America.
- Mahkamah Konstitusi. (2024). *SEJARAH DAN PERKEMBANGAN*. Retrieved July Thrusday, 2024, from <https://mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2>
- Molina, & Albir. (2002). *Translation Techniques Revisited: A Dynamic and Functionalist Approach*. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.
- Nababan, M. (2003). *Translation processes, practices, and products of professional Indonesian translators*. Wellington: Victoria University of Wellington.
- Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. Michigan: Universitas Michigan.
- Nida, E. A., & Taber, C. R. (1974). *The Theory and Practice of Translation*. Netherlands: The United Bible Society.
- Rasul, S. H. (2019). *Journalistic Translation*. Cambridge Scholars Publishing.

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

APPENDICES

L-1 Surat Penerimaan Magang



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1766/KP.02.00/03/2024
Lampiran : 1 dokumen
Perihal : Pemanggilan Peserta

Jakarta, 07 Maret 2024

Kepada Yth.

1. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan PNJ
2. Director of Internship and Career Center President University
3. Head of BBA Program IPMI International Business School

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan magang penerjemah di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk mendukung penyelenggaraan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan hal berikut.

1. Pelaksanaan magang penerjemah pada tanggal 1 April s.d. 14 Juni 2024 bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat.
2. Waktu pelaksanaan magang dimulai pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB pada hari Senin s.d. Jumat;
3. Daftar Mahasiswa yang diterima untuk magang penerjemah sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
4. Peserta bertugas menerjemahkan berita sidang dan non-sidang selama PHPU berlangsung, dan tugas lainnya yang ditetapkan oleh supervisor;
5. Tata Tertib Pelaksanaan Magang Penerjemah dan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan magang, dapat disimak oleh peserta melalui *whatsapp group (WAG)*.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia
dan Organisasi
Sri Handayani



Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Sri Handayani - NIP:197106202006042001

Digital Signature
mk-79143327240307010001

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran I

Nomor : 1766/KP.02.00/03/2024

Tanggal : 07 Maret 2024

**Daftar Peserta Magang Penerjemah
Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**

No	Nama Mahasiswa	Asal Institusi
1.	Dzaki Difa Al Hadiid	Politeknik Negeri Jakarta
2.	Frity Michael Br Sembiring	Politeknik Negeri Jakarta
3.	Intan Selvira Fauzi	Politeknik Negeri Jakarta
4.	Muhammad Ariva Aswin Bahar	Politeknik Negeri Jakarta
5.	Naomi Andrea Zebua	Politeknik Negeri Jakarta
6.	Putri Ratnasari	Politeknik Negeri Jakarta
7.	Bintang Salsabilla Rosda	President University
8.	Farah Shabrina	President University
9.	Gabrielle Karinawati Woodside	President University
10.	Jessica Rivena	President University
11.	Safira Anisa Putri	President University
12.	Siti Nurhaliza	President University
13.	Sedanti Anjali Putri	IPMI International Business School





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

L-2 Surat Perpanjangan Magang (PNJ)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
Jalan Prof. Dr. G. A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman: <http://www.pnj.ac.id>, Posel: humas@pnj.ac.id

Nomor : 2946/PL3/PK.01.09/2024

15 Mei 2024

H a l : Permohonan Perpanjangan Magang Industri

Yth.

Ibu Sri Handayani

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3, Gambir

Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Dengan hormat,

Merujuk pada surat kami nomor 1561/PL3/PK.01.09/2024 tanggal 27 Februari 2024 mengenai Pengiriman Mahasiswa Magang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, melalui surat ini kami sampaikan permohonan perpanjangan magang industri mahasiswa program studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional (Bispro) Jurusan Administrasi sampai 31 Juli 2024, atas nama:

No.	N a m a	N I M	No. HP	Email
1	Dzaki Difa Al Hadiid	2108411007	087772793564	dzaki.difa.al.hadiid.an21@mhs.sw.pnj.ac.id
2	Naomi Andrea Zebua	2108411019	089522087083	naomi.andrea.zebua.an21@mhs.sw.pnj.ac.id
3	Intana Selvira Fauzi	2108411024	08815434743	intana.selvira.fauzi.an21@mhs.sw.pnj.ac.id
4	Putri Ratnasari	2108411035	085782019602	putri.ratnasari.an21@mhs.sw.pnj.ac.id
5	Muhammad Ariva Aswin Bahar	2108411047	085710920177	muhammad.ariva.aswin.bahar.an21@mhs.sw.pnj.ac.id

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Ibu, kami ucapkan terima kasih.



an. Direktur

Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan

Iwa Sudradjat, S.T., M.T.

NIP 196106071986011002

Tembusan:

1. Direktur
2. Wakil Direktur Bidang Akademik
3. Ketua Jurusan Administrasi Niaga
4. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

L-3 Surat Perpanjangan Magang (MK)



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2924/KP.02.00/06/2024
Lampiran : -
Perihal : Informasi Penerimaan Magang

Jakarta, 13 Juni 2024

Yth. Direktur
Politeknik Negeri Jakarta
Di Tempat

Sehubungan dengan permohonan perpanjangan magang industri yang diajukan melalui Surat Nomor 2946/PL3/PK.01.09/2024, dapat kami sampaikan bahwa permohonan tersebut dapat diterima. Adapun ketentuan pelaksanaan kegiatan magang sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang dinyatakan diterima untuk magang adalah :

No	Nama	NIM	Keterangan
1	Dzaki Difa Al Hadiid	2108411007	Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional (Bispro)
2	Naomi Andrea Zebua	2108411019	
3	Intana Selvira Fauzi	2108411024	Jurusan Administrasi
4	Putri Ratnasari	2108411035	
5	Muhammad Ariva Aswin Bahar	2108411047	

2. Waktu pelaksanaan magang pada 19 s.d. 28 Juni 2024 dilaksanakan melalui *self learning* secara *hybrid* untuk penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan pada periode 1 April s.d. 14 Juni 2024. Sedangkan pada 1 s.d. 31 Juli 2024 dilaksanakan secara tatap muka bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat 10110.

Demikian penyampaian kami, informasi lebih lanjut dapat menghubungi (021) 23529000. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro SDM dan Organisasi
Sri Handayani



Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Sri Handayani - NIP.197106202006042001
Digital Signature
mk-1608705953240613092445

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177
Email: Office@mkri.id



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

L-4 Sertifikat



**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
ADMINISTRASI NIAGA

Jalan Prof. Dr. G. A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7863534, 7864927, 7864926, 7270042, 7270035

Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting

Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

FORM PEMBIMBINGAN PKL

1. Nama : Mahkamah Konstitusi
Perusahaan/Industri
2. Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat 6 Jakarta 10110
3. Judul PKL : Penerjemahan Teks Berita Sidang, Non Sidang Dan Majalah Di Mahkamah Konstitusi
4. Nama Penyelia : Yuniar Widiastuti

Hari/Tanggal	Aktivitas Yang Dilakukan
Senin, 01 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Pengenalan Subbagian Sekertariat AACC Dan Kerja Sama Luar Negeri Ksln • Orientasi Awal Magang
Selasa, 02 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Latihan Menerjemahkan Berita Non-Sidang
Rabu, 03 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Profil Hakim Mk • Mencari Dan Menginput Berita Mengenai Hubungan Internasional Antara Mahkamah Konstitusi Dengan Negara Lain Ke Dalam Google Docs
Kamis, 04 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Bersama AACC
Jumat, 05 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menyaksikan Sidang Pemeriksaan Persihan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2024 • Buka Puasa Bersama MK
Selasa, 16 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Majalah Konstitusi
Rabu, 17 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Meeting Bersama Humas Mk • Menerjemahkan Majalah Konstitusi
Kamis, 18 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Majalah Konstitusi
Jumat, 19 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Majalah Konstitusi
Senin, 22 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menyaksikan Sidang Putusan PHPU 2024 • Membuat Berita Sidang PHPU 2024
Selasa, 23 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Meeting Dengan Subbagian Kerja Sama Luar Negeri
Rabu, 24 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Meeting Dengan Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri (KSDN) • Mengunjungi Pusat Konstitusi
Kamis, 25 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi Kelompok Mengena Penugasan Daftar Kerja Sama Multilateral Antara Mkri Dengan Lembaga Sejenis Di Luar Negeri

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Jumat, 26 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Mempresentasikan Hasil Diskusi Mengenai Daftar Kerja Sama Multilateral Antara Mkri Dengan Lembaga Sejenis Di Luar Negeri • Mengambil Video Untuk Konten MK
Senin, 29 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Meeting</i> Bersama Mentor Untuk Persiapan Menerjemahkan Sidang PHPU 2024
Selasa, 30 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Rabu, 01 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Kamis, 02 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Jumat, 03 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Senin, 06 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Selasa, 07 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Rabu, 08 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Kamis, 09 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Jumat, 10 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Senin, 13 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Selasa, 14 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Rabu, 15 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Kamis, 16 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • -
Jumat, 17 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • -
Senin, 20 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Selasa, 21 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Rabu, 22 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Kamis, 23 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Jumat, 24 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Senin, 27 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Selasa, 28 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Rabu, 29 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Kamis, 30 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Jumat, 31 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Selasa, 04 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Rabu, 05 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Kamis, 06 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Jumat, 07 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Senin, 10 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Selasa, 11 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan Sidang Berita Pphu Legislatif 2024
Rabu, 12 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Tour MK
Kamis, 13 -30 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> • WFA Dan Mempersiapkan Laporan Magang
Senin, 01 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Briefing Penempatan Magang • Mengunjungi Pusat Konstitusi Mk
Selasa, 02 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Mengambil Foto Sidang • Mengajari Teman Cara Memakai Kamera Professional
Rabu, 03 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat Siaran Pers Untuk Perkara No,49/PUU-XXII2024



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	<ul style="list-style-type: none">• Merecap Konten Sosmed MK
Kamis, 04 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• Merecap Konten Sosmed Mk
Jumat, 05 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• Mengedit Majalah Konstitusi Edisi Juni 2024
Senin, 08 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• Membuat Siaran Pers Untuk Sidang Perkara• Menerjemahkan Berita Non Sidang
Selasa, 09 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• Membuat Siaran Pers
Rabu, 10 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• Merecap Dokumen Kerjasama MK Dengan Organisasi Dalam Negeri
Kamis, 11 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• Membuat Konten Tiktok MKRI
Jumat, 12 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• Melanjutkan Konten Tiktok MKRI
Senin, 15 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• Mendampingi Kunjungan Mahasiswa Dari Universitas Bojonegoro• Mendampingi Sidang Pemeriksaan Pendahuluan
Selasa, 16 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• Mendampingi Sidang Permohonan
Rabu, 17 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• -
Kamis, 18 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• Mengarsip MoU Antara MK Dan Universitas Di Indonesia
Jumat, 19 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• -
Senin, 22 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• Menerjemahkan Berita Puu• Menerjemahkan Majalah Konstitusi
Selasa, 23 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• Menerjemahkan Berita Puu• Menerjemahkan Majalah Konstitusi
Rabu, 24 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• Menerjemahkan Berita Puu• Menerjemahkan Majalah Konstitusi
Kamis, 25 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none">• Menerjemahkan Berita Puu• Menerjemahkan Majalah Konstitusi

Jakarta, 2024
Pembimbing/Penyedia Magang

Yuniar Widiastuti



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

L-6 Form Bimbingan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
ADMINISTRASI NIAGA

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok
16425 Telepon (021) 7863534, 7864927, 7864926,
7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

FORM PEMBIMBINGAN PKL
(Pembimbing PNJ)

JUDUL PKL : Penerjemahan Teks Berita Sidang, Non Sidang Dan
Majalah Di Mahkamah Konstitusi

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	Rabu, 15 Mei 2024	Pembahasan BAB	
2	Rabu, 19 Juni 2024	Revisi BAB I dan II	
3	Jumat, 12 Juli 2024	Pemeriksaan BAB I dan II dan Pembahasan BAB III dan IV	
4	Rabu, 17 Juli 2024	Revisi BAB III dan IV	

Depok,2024
Pembimbing,

(Dra., Ina Sukaesih, Dipl. TESOL., M.M., M.Hum)
NIP 196104121987032004



L-7 Penerjemahaan Liputan Khusus Majalah Konstitusi

Liputan Khusus	SPECIAL COVERAGE
BERPACU MENUJU SENGKETA HASIL PEMILU	Racing Towards Election Disputes
Pesta demokrasi dalam pemilihan umum (Pemilu) baru saja berlalu. Pemilu digelar secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 14 Februari 2024. Pemilu merupakan sarana perwujudan daulat rakyat (demokrasi). Tujuan pemilu yaitu untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 serta menjamin kesinambungan pembangunan nasional.	The democratic festival of the General Election (Pemilu) has just concluded. Election was held simultaneously across the entire territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia on February 14, 2024. Election is a means of realizing people's sovereignty (democracy). The purpose of Election is to form a democratic, strong government that gains public support to achieve national goals as mandated by the 1945 Constitution and to ensure the continuity of national development.
Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional (Constitutional-democratic state). Dalam sistem demokrasi konstitusional, daulat rakyat dan daulat hukum seiring sejalan saling menguatkan. Demokrasi tanpa hukum dapat menimbulkan anarkhi. Sedangkan hukum tanpa demokrasi menyebabkan diskriminasi. Intinya, demokrasi (daulat rakyat) dan nomokrasi (daulat hukum) tidak dapat dipisahkan.	Indonesia is a constitutional-democratic state. In a constitutional democracy, people's sovereignty and the rule of law reinforce each other. Democracy without law may lead to anarchy, while law without democracy causes discrimination. Essentially, democracy (people's sovereignty) and nomocracy (rule of law) cannot be separated.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>Sejak Republik Indonesia berdiri hingga saat ini, Pemilu Anggota DPR dan DPRD telah dilaksanakan 13 kali. Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955. Berikutnya pemilu dilaksanakan pada 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan terakhir Pemilu 2024.</p>	<p>Since the founding of the Republic of Indonesia, legislative elections have been held 13 times. The first elections were held in 1955, followed by elections in 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, and the most recent in 2024.</p>
<p>Sengketa Hasil Pemilu di MK 2004-2024</p>	<p>Election Result Disputes at the Constitutional Court 2004-2024</p>
<p>Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang melaksanakan rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilu 2024. Masyarakat dapat menyaksikan real count hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang dirilis KPU di laman https:// pemilu2024.kpu.go.id/.</p>	<p>Currently, the General Elections Commission (KPU) is conducting the recapitulation of the 2024 Election vote counts. The public may monitor the real-time results of the Presidential and Vice Presidential elections (Pilpres) released by the KPU on the https://pemilu2024.kpu.go.id/.</p>
<p>Tentu saja kita berharap tahapan rekapitulasi berlangsung aman, tertib, dan lancar. Para peserta pemilu dan para pendukungnya, dituntut bersabar menanti hasil akhir pemilu yang akan disampaikan secara resmi oleh KPU. Semua permasalahan yang terjadi dalam proses pemilu dapat ditangani dan diselesaikan di tingkat penyelenggara sehingga tidak harus beperkara di MK.</p>	<p>We naturally hope the recapitulation phase proceeds smoothly and orderly. Election participants and their supporters should remain patient for the final results, which the KPU will officially announce. Ideally, any issues that arise during the election process should be resolved by the organizers, avoiding the need for disputes at the Constitutional Court (MK).</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>Kendati demikian, sejak jauh hari MK bersiap diri, mengantisipasi mengalirnya perkara sengketa pasca KPU secara resmi mengumumkan hasil Pemilu 2024. Berbagai ikhtiar telah dilakukan MK di antaranya, menerbitkan regulasi berupa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) ihwal tata beracara dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, DPD serta perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden. MK juga membentuk Gugus Tugas Penanganan Perkara PHPU 2024 yang melibatkan seluruh pegawai. Bahkan MK juga telah mengadakan bimtek yang melibatkan partai politik peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu, dan organisasi advokat.</p>	<p>However, anticipating potential post-election disputes once the KPU officially announces the 2024 Election results, the Court has been preparing for this possibility. Various efforts have been made by the Court, including issuing regulations in the form of Constitutional Court Regulations (PMK) regarding procedures in PHPU cases for members of the House of Representative (DPR) and People Legislative Council (DPRD), (Regional Representative Council (DPD), as well as the President and Vice President. The Court also established the 2024 PHPU Case Handling Task Force involving all staff. Furthermore, the Court has conducted technical guidance sessions involving political parties, election organizers, and advocacy organizations.</p>
<p>Sejak MK berdiri pada 2023, MK telah menangani sengketa pemilu sebanyak empat kali, yakni sengketa Pemilu 2004, 2009, 2014, 2019. Secara statistik, 676 perkara sengketa pemilu telah diputus oleh MK. Pengalaman selama empat kali menangani sengketa pemilu tersebut menjadi bahan pembelajaran berharga bagi MK untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara sengketa Pemilu 2024.</p>	<p>Since its establishment in 2003, the Court has handled election disputes four times: in the 2004, 2009, 2014, and 2019 elections. Statistically, the Court has resolved 676 election dispute cases. The experience from handling these disputes has been invaluable for the Court to improve the quality of handling the 2024 election dispute cases.</p>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>Pemilu adalah urat nadi demokrasi. Suara rakyat dalam pemilu adalah jantung demokrasi. Demokrasi akan mati jika suara rakyat dalam pemilu tidak dilindungi.</p>	<p>Elections are the lifeblood of democracy. The people's voice in elections is the heart of democracy. Democracy will perish if the people's voice in elections is not protected.</p>
<p>Sengketa Hasil Pemilu 2004</p>	<p>2004 Election Dispute</p>
<p>Pemilu 2004 menjadi pembuka sejarah pemilu langsung di Indonesia. Untuk pertama kalinya rakyat memilih langsung anggota DPR, DPD, DPRD (Provinsi, Kabupaten/Kota), serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Legislatif Tahun 2004 diikuti oleh 24 Parpol. Pemilu DPD diikuti oleh 128 perseorangan calon anggota DPD. Sedangkan Pemilu Presiden diikuti oleh lima pasangan calon, yaitu pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid, pasangan Megawati Soekarnoputri-Ahmad Hasyim Muzadi, pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar.</p>	<p>The 2004 Election marked the beginning of direct elections in Indonesia. For the first time, citizens directly elected members of the DPR, DPD, DPRD (Provincial, District/City), and the President and Vice President. The 2004 Legislative Election was participated by 24 political parties. The DPD election had 128 independent candidates, while the Presidential Election featured five pairs of candidates: Wiranto-Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri-Ahmad Hasyim Muzadi, Amien Rais-Siswono Yudo Husodo, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, and Hamzah Haz-Agum Gumelar.</p>
<p>Hasil Pemilu 2004 menyisakan sengketa yang bermuara ke MK. Sebanyak 23 Parpol mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Legislatif 2004 ke MK. Kemudian 21 calon anggota DPD dari 13 provinsi, juga mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu 2004 ke MK. Mereka menganggap telah terjadi kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU, sehingga</p>	<p>The results of the 2004 Election led to disputes that ended up in the Court. A total of 23 political parties filed disputes over the Legislative Election results. Additionally, 21 DPD candidates from 13 provinces also filed disputes, alleging errors in vote counting by the KPU that affected their election as DPD members.</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>mempengaruhi terpilihnya mereka menjadi anggota DPD.</p>	
<p>Permohonan perselisihan hasil Pemilu juga dilayangkan oleh pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid. Pasangan ini menganggap KPU telah keliru dalam melakukan penghitungan suara yang mengakibatkan pasangan mereka kehilangan jumlah suara yang signifikan sehingga tidak dapat berlaga dalam Pemilu Presiden 2004 Putaran Kedua.</p>	<p>The Wiranto-Salahuddin Wahid pair also filed a dispute, claiming the General Election Commission (KPU) made significant counting errors, resulting in their exclusion from the second round of the 2004 Presidential Election.</p>
<p>Di tengah keterbatasan fasilitas ruangan, MK menyidangkan perkara sengketa Pemilu 2004. Saat itu, MK sempat menggunakan fasilitas ruang milik Radio Republik Indonesia (RRI) dan Mabes Polri untuk menyidangkan perkara sengketa Pemilu 2004.</p>	<p>Due to limited facilities, the Court held the 2004 election dispute hearings using facilities from Radio Republik Indonesia (RRI) and the National Police Headquarters.</p>
<p>Ilustrasi partai politik peserta Pemilu 1955</p>	<p>Illustration of political parties participating in the 1955 General Election</p>
<p>Sengketa Pemilu 2009</p>	<p>2009 General Election Dispute</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>Pemungutan suara Pemilu 2009 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD hampir secara serentak dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia pada 9 April 2009. Pemilu 2009 diikuti oleh 44 Parpol yang terdiri dari 38 partai nasional dan 6 Parpol lokal Aceh.</p>	<p>The 2009 General Election vote was held almost simultaneously across Indonesia on April 9, 2009, to elect members of the DPR, DPD, and DPRD. The 2009 election saw participation from 44 political parties, consisting of 38 national parties and six local Aceh parties.</p>
<p>Sedangkan Pemungutan suara Pemilu Presiden 2009 diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pilpres diikuti tiga pasangan calon, yaitu Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, dan pasangan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto.</p>	<p>The Presidential Election vote took place on July 8, 2009, with three pairs of candidates: Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, and Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto.</p>
<p>Hasil Pemilu 2009 juga tak lepas dari sengketa. Untuk kali yang kedua sejak Pemilu 2004, pada Pemilu 2009 MK menangani sengketa hasil Pemilu. Sebanyak 69 perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif 2009 diputus MK. MK juga memutus perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, dan pasangan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto.</p>	<p>The 2009 election results also led to disputes. For the second time since 2004, the Court handled election result disputes. The Court ruled on 69 disputes over the 2009 Legislative Election results and also on disputes over the Presidential Election results filed by the Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto and Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto pairs.</p>
<p>Proses pencoblosan dalam Pemilu Tahun 2024 pada Rabu (14/2) silam</p>	<p>Voting process in the 2024 general election on Wednesday (14/2)</p>
<p>Sengketa Hasil Pemilu 2014</p>	<p>2014 Election Dispute</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>Pemungutan suara Pemilu 2014 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD hampir serentak dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia pada 9 April 2014. Pemilu 2014 diikuti oleh 15 Parpol yang terdiri dari 12 partai nasional dan 3 Parpol local Aceh.</p>	<p>The 2014 General Election for DPR, DPD, and DPRD members was held almost simultaneously across Indonesia on April 9, 2014. The 2014 election featured 15 political parties: 12 national parties and three local Aceh parties.</p>
<p>Tiga bulan berselang, tepatnya pada 9 Juli 2014 dilaksanakan Pemilu Presiden. Pemilu Presiden kali ini hanya diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan pasangan Prabowo SubiantoHatta Rajasa. Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden mengalahkan pasangan Prabowo SubiantoHatta Rajasa.</p>	<p>Three months later, on July 9, 2014, the Presidential Election was held, with only two pairs of candidates: Joko Widodo-Jusuf Kalla and Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Joko Widodo-Jusuf Kalla won the election, defeating Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.</p>
<p>Merasa dirugikan dengan hasil Pemilu Presiden 2014, pasangan Prabowo SubiantoHatta Rajasa mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden ke MK. Setelah melalui proses pemeriksaan di persidangan, pada 21 Agustus 2014 akhirnya MK memutuskan menolak seluruh permohonan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.</p>	<p>Feeling aggrieved by the Presidential Election results, the Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pair filed a dispute with the Court. After a series of court examinations, the Court eventually rejected their claims entirely on August 21, 2014.</p>
<p>Sebelumnya, MK telah memutus permohonan perselisihan hasil Pemilu Legislatif yang diajukan oleh seluruh Parpol nasional dan yang diajukan oleh Parpol lokal Aceh, serta memutus permohonan yang diajukan oleh calon anggota DPD.</p>	<p>Previously, the Court had resolved disputes over the Legislative Election results filed by national and local Aceh parties, as well as disputes filed by DPD candidates.</p>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Sengketa Hasil Pemilu 2019	2019 Election Dispute
<p>Pemilu Serentak 2019 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Salah satu perbedaan mendasar adalah dari segi pelaksanaan. Pada Pemilu 2014, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan secara terpisah dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.</p>	<p>The 2019 General Election differed fundamentally from previous elections. In the 2014 election, the elections for DPR, DPD, and DPRD members were held separately from the Presidential Election.</p>
<p>Sedangkan pemungutan suara Pemilu 2019 secara serentak digelar hampir di seluruh wilayah Indonesia pada 17 April 2019. Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), serta Presiden dan Wakil Presiden.</p>	<p>In contrast, the 2019 General Election vote was held almost simultaneously across Indonesia on April 17, 2019, for electing members of the DPR, DPD, DPRD (Provincial and District/City), and the President and Vice President.</p>
<p>Pemilu 2019 diikuti 14 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh. Kemudian 807 peserta perorangan calon anggota DPD. Pada pemilu kali ini terdapat dua pasangan calon presiden, yakni Pasangan Joko Widodo- Ma'ruf Amin (JokowiMa'ruf) dan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.</p>	<p>The 2019 General Election featured 14 national political parties and four local Aceh parties, as well as 807 independent DPD candidates. There were two pairs of presidential candidates: Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) and Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>KPU menetapkan pasangan Joko WidodoMa'ruf Amin memperoleh suara terbanyak. Pasangan Prabowo-Sandi merasa tidak puas dengan proses dan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dalam Pemilu Serentak 2019 yang ditetapkan oleh KPU. Tim kuasa hukum pasangan Prabowo-Sandi mendaftarkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ke MK. Walhasil amar putusan MK yang diucapkan pada Kamis, 27 Juni 2019 pukul 21.16 WIB menyatakan menolak permohonan Pasangan Prabowo-Sandi untuk seluruhnya.</p>	<p>The KPU declared the Joko Widodo-Ma'ruf Amin pair as the winners. However, the Prabowo-Sandi team, dissatisfied with the process and results of the Presidential Election, filed a dispute with the Court. The Court, in its ruling on June 27, 2019, at 21:16 WIB, rejected their claims entirely.</p>
<p>Menatap Sengketa Hasil Pemilu 2024</p>	<p>Anticipating the 2024 Election Dispute</p>
<p>Pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Senada dengan Pemilu 2019, Pemilu 2024 juga digelar serentak lima kotak.</p>	<p>The 2024 Election vote took place on February 14, 2024. Similar to the 2019 election, the 2024 Pemilu was conducted with five ballot boxes.</p>
<p>Warga negara yang telah memiliki hak pilih, mencoblos lima kertas suara yang kemudian dimasukkan ke dalam lima kotak suara. Kertas suara warna hijau untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota, warna biru untuk memilih DPRD Provinsi, warna kuning untuk memilih anggota DPR RI, warna merah untuk memilih anggota DPD RI, serta kertas suara warna abuabu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.</p>	<p>Eligible voters cast their votes for five different ballots, each placed in five separate boxes: green for DPRD District/City members, blue for DPRD Provincial members, yellow for DPR RI members, red for DPD RI members, and grey for the President and Vice President.</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>Pemilu 2024 diikuti 24 partai politik yang terdiri atas 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal Aceh. Sedangkan untuk pemilu presiden dan wakil presiden diikuti oleh tiga pasangan calon. Pasangan Nomor Urut 1 H. Anies Rasyid Baswedan-H.A. Muhaimin Iskandar, pasangan Nomor Urut 2 H. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan Nomor Urut 3 H. Ganjar PranowoH.M. Mahfud MD.</p>	<p>The 2024 Election saw participation from 24 political parties: 18 national parties and six local Aceh parties. The Presidential Election featured three pairs of candidates: H. Anies Rasyid Baswedan-H.A. Muhaimin Iskandar, H. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, and H. Ganjar Pranowo-H.M. Mahfud MD.</p>
<p>Apakah hasil suara Pemilu 2024 yang ditetapkan KPU menuai sengketa di MK? Tentu kita berharap, permasalahan bisa diselesaikan di tingkat penyelenggara. Namun demikian, MK telah bersiap diri menangani sengketa.</p>	<p>Will the KPU's results for the 2024 Election lead to disputes at the Court? We hope any issues can be resolved by the organizers. Nonetheless, the Court is prepared to handle potential disputes.</p>





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

L-8 Penerjemahan Opini Konstitusi

KEMATIAN (LAGI) PARTAI POLITIK	The Recurrent Demise of Political Parties in Indonesia
Eksistensi partai politik di Indonesia timbul tenggelam seturut peralihan dan perebutan kekuasaan negara. Pada era prakemerdekaan Indonesia, organisasi menjadi alat terpenting untuk menghimpun semangat kebangsaan yang berupaya memerdekakan Indonesia. Partai politik adalah salah satu wujud organisasi demikian, yang dibentuk dengan mendasarkan kesamaan tujuan serta kesamaan cara untuk mencapai tujuan.	The existence of political parties in Indonesia has ebbed and flowed with the shifts and struggles for state power. During the pre-independence era, organizations were crucial in rallying nationalistic fervor to liberate Indonesia. Political parties were one such form of organization, created based on shared goals and methods to achieve them.
Setelah Indonesia merdeka, keberadaan partai politik mencapai masa kejayaannya. Semua orang atau kelompok dibebaskan membentuk partai politik, tanpa ada pembatasan ideologi anutan. Sayangnya banyak dan beragamnya partai politik yang ada belum diikuti dengan Pemilu yang ajeg. Dalam kurun waktu dua puluh lima tahun sejak awal kemerdekaan, Pemilu baru dapat terselenggara satu kali, yaitu di tahun 1955. Pemilu 1955 bertujuan mengisi kursi DPR dan Konstituante, dengan diikuti lebih dari 30 partai politik dan lebih dari seratus peserta perorangan.	After Indonesia gained independence, political parties experienced a golden era. Individuals and groups were free to establish political parties without ideological restrictions. Unfortunately, the sheer number and diversity of political parties were not matched by consistent elections. In the twenty-five years following independence, the first general election was held only once, in 1955. The 1955 election aimed to fill seats in the DPR (House of Representatives) and the Constituent Assembly, involving more than 30 political parties and over a hundred individual candidates.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>Setelah Pemilu 1955 hingga berakhirnya Pemerintahan Soekarno di akhir tahun 60-an, keberadaan partai politik mulai surut. Pertentangan antarpartai politik mengakibatkan Pemerintah ikut campur dengan membekukan beberapa partai yang tidak sejalan dengan Pemerintah.</p>	<p>From the 1955 election until the end of Sukarno's administration in the late 1960s, political parties began to wane. Conflicts among political parties led the government to intervene, freezing several parties that did not align with its policies.</p>
<p>Pasca pemerintahan Presiden Soekarno berakhir pada 1967, Soeharto yang diangkat menjadi Presiden Mandataris MPR/S berupaya menyelenggarakan kembali Pemilu. Pemilu pada era Orde Baru pertama kali dilakukan pada 1971 dengan diikuti “hanya” 10 partai politik, atau sepertiga jumlah partai politik peserta Pemilu 1955.</p>	<p>After Sukarno's presidency ended in 1967, Suharto, who was appointed as the People's Consultative Assembly Mandataris (Suharto era), attempted to reintroduce elections. The first election during the New Order era was held in 1971, with participation limited to only ten political parties—one-third of the number in the 1955 election.</p>
<p>Enam tahun setelahnya, pada Pemilu 1977, peserta pemilu tinggal dua partai politik dan satu golongan karya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta satu Golongan Karya. Berkurangnya jumlah peserta pemilu menjadi tiga ini tidak lain akibat “cawe-cawe” Presiden Soeharto dengan kebijakan fusi ‘penggabungan’ partai politik.</p>	<p>Six years later, in the 1977 General Election, only two political parties and one functional group participated: the Indonesian Democratic Party (PDI), the United Development Party (PPP), and Party of Functional Groups. This reduction to three participants was due to President Suharto's intervention with his fusion policy of merging political parties.</p>
<p>Sejak itu hingga kejatuhan Presiden Soeharto akibat Reformasi 1998, jumlah peserta pemilu dan jumlah partai politik tetap sama. Tidak ada pengurangan, akan tetapi tidak pula ada penambahan.</p>	<p>From then until President Suharto's fall due to the 1998 Reform, the number of electoral participants and political parties remained unchanged. There was neither a reduction nor an increase.</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>Pasca Reformasi 1998, pada era Pemerintahan B.J. Habibie kebijakan fusi partai politik dicabut. Pemilu 1999, yang dilaksanakan setahun setelah Soeharto turun, diikuti oleh 48 partai politik dan menandai kembalinya eksistensi partai politik di Indonesia.</p>	<p>After the 1998 Reform, under President B.J. Habibie's administration, the fusion policy was revoked. The 1999 General Election, held a year after Suharto stepped down, saw the participation of 48 political parties, marking the resurgence of political parties in Indonesia.</p>
<p>Kebangkitan Partai Politik</p>	<p>Revival of Political Parties</p>
<p>Melalui amandemen UUD 1945 bahkan partai politik diletakkan menjadi tulang punggung sistem kepemiluan. Partai politik ditempatkan sebagai (nyaris) satu-satunya entitas politik yang berwenang mewakili kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum.</p>	<p>Through the amendments to the 1945 Constitution, political parties have been established as the backbone of the electoral system. Political parties are placed as the (almost) sole political entities authorized to represent the people's will through the electoral mechanism.</p>
<p>Proses pengajuan kontestan pemilu didominasi oleh partai politik, kecuali pengajuan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan pengajuan sebagian calon kepala daerah. Dengan kata lain, partai politik diberi kewenangan untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR), calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta pasangan calon kepala daerah. Hanya calon anggota DPD dan pasangan kepala daerah independen yang pengajuannya tidak melalui partai politik.</p>	<p>The nomination process for election contestants is dominated by political parties, except for the nomination of Regional Representative Council (DPD) members and some regional head candidates. In other words, political parties are authorized to nominate presidential and vice-presidential candidates, candidates for the Regional People's Representative Council (DPR), candidates for the Regional House of Representatives (DPRD), and pairs of regional head candidates. Only DPD members and independent regional head candidates are not nominated through political parties.</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>Sayangnya kebangkitan peran partai politik tersebut tidak bertahan lama. Pemilu kali ini, terutama Pilpres 2024, menunjukkan kecenderungan bahwa dominasi bahkan keberadaan partai politik mulai sirna. Tentu bukan sirna dalam arti eksistensinya (keberadaan secara fisik) hilang, melainkan sirna dalam hal esensi atau peran kelembagaan.</p>	<p>Unfortunately, the resurgence of political parties' roles did not last long. This election, especially the 2024 Presidential Election, shows a tendency for the dominance and even the existence of political parties to begin to fade. Not in the sense of their physical existence, but in terms of their institutional essence or role.</p>
<p>Hal yang lebih ironis, sirnanya keberadaan partai politik demikian sama sekali bukan karena adanya perubahan hukum atau faktor eksternal, namun karena perubahan perilaku sekaligus penurunan rasa percaya diri partai politik itu sendiri. Partai politik mulai kehilangan kepercayaan diri untuk secara mandiri menentukan visi dan misi, program kerja, bahkan siapa yang akan mereka usung dan calonkan. Partai politik melarikan diri dari kebebasan terbesar mereka, yaitu kebebasan memutuskan tujuannya sendiri.</p>	<p>Ironically, this fading presence of political parties is not due to legal changes or external factors, but rather due to changes in behavior and a decline in the confidence of the political parties themselves. Political parties have begun to lose confidence in independently determining their vision and mission, work programs, and even who they will support and nominate. Political parties are fleeing from their greatest freedom, the freedom to decide their own objectives.</p>
<p>Hakikat Partai Politik</p>	<p>Essence of Political Parties</p>
<p>Istilah “partai politik” merupakan gabungan kata partai dan politik. “Partai” berasal dari kata pars (bahasa Latin) atau part (bahasa Inggris), yang artinya adalah ‘bagian’. Sementara istilah “politik” berasal dari kata polis (bahasa Latin) yang berarti ‘kota’. Sederhananya istilah partai politik merujuk pada sekelompok masyarakat berkepentingan sama yang merupakan bagian dari, atau mengambil bagian dalam, pemerintahan kota/negara.</p>	<p>The term "political party" is a combination of the words "party" and "political." "Party" comes from the Latin word "pars" or the English word "part," meaning 'a portion.' Meanwhile, "political" derives from the Latin word "polis," meaning 'city.' Simply put, a political party refers to a group of people with the same interests who are part of or take part in the governance of a city or state.</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>Penekanan konsep partai politik adalah pada daulat rakyat. Lebih spesifik pada daulat anggota partai politik atau konstituen. Hal inilah yang menjadi alasan utama kelahiran partai politik, yaitu sarana artikulasi kepentingan atau kehendak rakyat. Esensi partai politik adalah pada kehendak bebas atau kemerdekaannya yang mewakili kepentingan rakyat.</p>	<p>The core concept of a political party is rooted in popular sovereignty, more specifically in the sovereignty of party members or constituents. This is the primary reason for the existence of political parties, which serve as a means to articulate the interests or will of the people. The essence of a political party lies in its freedom or independence to represent the people's interests.</p>
<p>Secara alamiah terbentuknya partai politik tidak melulu berasal dari kehendak/kepentingan kolektif rakyat, melainkan dapat terbentuk pula berdasar prakarsa atau kesengajaan seseorang tertentu. Dengan kata lain terdapat dua tipe partai politik, yaitu partai berbasis kepentingan kader/ konstituen dan partai berbasis kepentingan pendiri partai. Kategorisasi demikian tentu tidak mutlak, melainkan tergantung sepenuhnya pada perspektif atau sudut pandang pengamat.</p>	<p>Naturally, the formation of a political party does not always stem from the collective will or interest of the people; it may also be formed based on the initiative or intention of certain individuals. In other words, there are two types of political parties: those based on the interests of members/constituents and those based on the interests of the party founders. Such categorization is not absolute and depends entirely on the observer's perspective.</p>
<p>Pemilu 2024: Matinya Partai Politik?</p>	<p>2024 Elections: The Death of Political Parties?</p>
<p>Kecenderungan sirna atau hilangnya esensi partai politik terlihat manakala kehendak partai-partai politik besar pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden ternyata dikendalikan oleh sosok atau figur yang justru bukan bagian dari partai politik bersangkutan. Praktik pengendalian demikian, yang dilakukan secara terang dan terbuka, merupakan tikaman keras bagi esensi partai politik di Indonesia.</p>	<p>The tendency of political parties losing their essence becomes apparent when the will of major political parties nominating presidential and vice-presidential candidates is actually controlled by figures outside those parties. This practice, done openly, is a severe blow to the essence of political parties in Indonesia.</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>Partai politik sebagai entitas -kumpulan orang pintar- yang seharusnya rasional, justru secara sukarela menyerahkan kendali atas diri mereka kepada pihak yang sama sekali bukan bagian dari mereka. Konsep partai (pars atau part) sebagai salah satu bagian dari masyarakat-negara, yang mengandaikan adanya perbedaan kepentingan dengan pars lainnya, ternyata begitu mudah disatukan dan menyatu hanya berdasarkan kepentingan pragmatis, yaitu elektabilitas semu bahkan sekedar iming-iming coattail effect. Hal demikian tidak terlalu mengagetkan mengingat rata-rata partai politik tidak mempunyai ketegasan ideologi dan tidak pula mengenal tradisi oposisi.</p>	<p>Political parties, as entities comprising intelligent individuals who are expected to be rational, are voluntarily relinquishing control to those who are not part of them. The concept of a party (pars or part), which suggests different interests among parts of society, is easily unified based on pragmatic interests like superficial electability or the lure of the coattail effect. This is not surprising, considering most political parties lack firm ideology and do not embrace opposition traditions.</p>
<p>Boleh saja partai politik berkilah bahwa “penyerahan kendali diri” seharusnya dimaknai sebagai mekanisme penyerapan aspirasi rakyat, yang kebetulan disampaikan melalui pihak non partai politik. Atau dari sisi rakyat, penyerahan kendali demikian dapat dimaknai sebagai pergerakan rakyat (melalui figur tertentu) untuk mengambil kembali kedaulatan yang selama ini dititipkan kepada partai politik. Alasannya bisa jadi karena partai politik tidak benar-benar mendengarkan dan mewujudkan aspirasi rakyat.</p>	<p>Political parties might argue that this "relinquishing control" should be seen as a mechanism for absorbing the people's aspirations, coincidentally conveyed through non-political party figures. From the people's perspective, this could be viewed as a movement to reclaim sovereignty from political parties that fail to listen to and realize their aspirations.</p>
<p>Kemungkinan mana pun yang terjadi, kendali pihak non partai politik kepada partai politik adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri. Di sinilah kemudian esensi partai politik sebagai pemain utama dalam pemilu, terutama dalam pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden, mulai goyah. Partai politik tak lebih menjadi cangkang atau selubung bagi kepentingan pihak non-partai politik. Eksistensi partai politik masih langgeng, namun sejatinya yang esensi telah hilang terhapus.</p>	<p>Whatever the reason, the fact remains that non-political figures control political parties. Here lies the crux where the essence of political parties as key players in elections, particularly in nominating presidential and vice-presidential candidates, starts to waver. Political parties become mere shells or veils for non-political interests. The existence of political parties remains, but their essence has vanished.</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>Lantas muncul pertanyaan apakah partai politik masih diperlukan? Mungkin sudah saatnya mempertimbangkan kembali untuk sekalian saja mengizinkan pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden secara independen alias tidak melalui jalur partai politik. Apalagi pada tahun 2007 pencalonan kepala daerah dari jalur independen sudah memperoleh payung hukum dan telah diimplementasikan hingga hari ini.</p>	<p>This raises the question: are political parties still necessary? It might be time to consider allowing independent presidential and vice-presidential candidates without party affiliation. In 2007, independent regional head candidates were legally recognized and have been implemented since.</p>
<p>Dalam konteks demikian, Pemilu 2024 terutama Pilpres, bukan hanya wahana bagi rakyat untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden lima tahun ke depan, melainkan wahana bagi partai politik untuk menentukan masa depan kemandirian mereka sendiri. Pilihan sikap partai politik hari ini akan membawa dua kemungkinan, yaitu meneguhkan peran dan posisinya di Indonesia, atau justru menghadirkan sekali lagi kematian esensi partai politik.</p>	<p>In this context, the 2024 elections, especially the presidential election, are not just a platform for the people to choose their leaders for the next five years but also an arena for political parties to decide their future independence. The choices political parties make today will either reaffirm their role and position in Indonesia or lead to the demise of their essence once again.</p>

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

L-9 Berita PHPU

Berita Bahasa Indonesia	Berita Bahasa Inggris
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20248	https://en.mkri.id/news/details/2024-04-29/PPP Claims Votes in W. Sumatra 1 Went to Garuda
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20257	https://en.mkri.id/news/details/2024-04-29/KPU Allegedly Used Special Voters List Illegally at 15 Muara Jaya TPS
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20266	https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20266&lang=eng
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20269	https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20266&lang=eng
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20298	https://en.mkri.id/news/details/2024-04-30/PPP Alleges Vote Purge in Four West Java Electoral Districts
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20306	https://en.mkri.id/news/details/2024-04-30/Gerindra Asks Revote in 53 Subdistricts in Majalengka, Subang
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20313	https://en.mkri.id/news/details/2024-04-30/PAN Wishes Cirebon 2 Tally Canceled, Says KPU Purged Votes
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20320	https://en.mkri.id/news/details/2024-04-30/PAN Wishes Cirebon 2 Tally Canceled, Says KPU Purged Votes
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20328	https://en.mkri.id/news/details/2024-04-30/Gerindra Candidates Fight for Votes for Bekasi DPRD
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20367	https://en.mkri.id/news/details/2024-05-02/PPP Disputes Vote Transfer to Garuda in North Sumatra DPR Election
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20377	https://en.mkri.id/news/details/2024-04-30/Three-Vote Margin, Gerindra Candidate Challenges Bekasi City 1 DPRD Results
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20385	https://en.mkri.id/news/details/2024-05-13/KPU Rejects PDI-P's Request for Revote in Bombana Regency 3
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20390	https://en.mkri.id/news/details/2024-05-02/Democrat Candidates Fight over Vote Inflation in Serdang Bedagai 4
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20401	https://en.mkri.id/news/details/2024-05-02/North Sumatra DPD Candidate Accuses KPU of Vote Inflation
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20410	https://en.mkri.id/news/details/2024-05-02/Democratic Party Claims Vote Inflation for PAN in South Kalimantan I



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20421	https://en.mkri.id/news/details/2024-05-02/Suspecting_Vote_Buying_Gerindra_Fights_for_DPRD_Second_Seat_in_Batam_City_2
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20569	https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20569&lang=eng

